

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran berdiri sejak tahun 2024. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran belum mempunyai bangunan perkantoran yang menetap (masih sewa) dan saat ini Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran beralamat di Jalan Raya Cikembulan No 105 Pangandaran Tlp. (0265) 7500675.

4.1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 81 tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Organisasi Dinas memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk membantu bupati dalam merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantu yang diberikan kepada kabupaten.

Adapun uraian tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantu yang diberikan kepada kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional
 - b. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Bidang Sarana dan Keselamatan
 - c. sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.

- (4) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten
 - b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
 - c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
 - g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;
 - h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten;
 - i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten;
 - j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - l. mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - m. memimpin, mengatur, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

- n. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
- o. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada di Daerah Kabupaten;
- p. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- q. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
- r. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten;
- s. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten;
- t. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten;
- u. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;

- v. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan;
- w. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- x. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten;
- y. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- z. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- aa. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- bb. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- cc. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- dd. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;

- ee. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- ff. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- gg. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan per.gumpan lokal;
- hh. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- ii. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- jj. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- kk. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- ll. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter;
- mm. penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten;
- nn. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umurn yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- oo. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

- pp. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten;
- qq. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang .jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- rr. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten;
- ss. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operaisi, I dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten;
- tt. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- uu. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan kehajmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- vv. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- ww. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- xx. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
- yy. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;

- zz. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
 - aaa. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - bbb. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - ccc. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - ddd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
 - eee. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Kepala Dinas membawahkan:
- 1. Sekretariat;
 - 2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 3. Bidang Prasarana dan Keselamatan; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok merencanakan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan

kepegawaian dan umum, keuangan serta program yang meliputi perejicanaan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai. Dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas:
 - a. koordinasi kegiatan Dinas Perhubungan;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Perhubungan;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan/aset daerah yang menjadi langgung jawab Dinas sesuai peraturan yang berlaku;

- e. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dinas sesuai peraturan yang berlaku;
 - f. mengelola administrasi keuangan pada dinas sesuai peraturan yang berlaku
 - g. mengelola ketatausahaan, kearsipan dan rumah tangga dinas untuk kelancaran pelaksanaan dinas;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga;
 - i. mengelola urusan keprotokolan dan humas untuk kelancaran tugas dinas;
 - j. mengelola urusan kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku;
 - k. mengkoordinasikan penyusunan dokumen evaluasi kinerja sesuai:peraturan yang ada; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, sekretariat membawahkan:
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala SubbagLan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan

kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, Umum, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengari lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja SubbagLan Kepegawaian dan Umum.

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapan dinas;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam rangka menunjang kegiatan operasional perkantoran;
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana, urussn dalam dan kehumasan;

- d. menyusun daftar inventarisasi aset daerah dilingkup dinas berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
- e. melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan serta administrasi surat menyurat untuk tertib administrasi;
- f. menyusun bahan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- g. pengelolaan data, informasi dan arsip kepegawaian serta pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyusun data dan informasi kepegawaian sesuai telaahan data agar tersediannya Daftar Unit Kepangkatan (DUK) pegawai yang tepat dan aktual;
- i. menyusun bahan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan yang ada dan pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- j. memproses urusan kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku;
- k. menyusun dokumen evaluasi kinerja dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- l. penyiapan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian dan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;

- m. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi produk hukum bidang perhubungan; dan
 - n. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- b) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi:
 - a. menyelenggarakan urusan ketatausahaan keuangan dinas;
 - b. menyiapkan dan menghimpun bahan perumusan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas;

- c. menyusun dokumen perencanaan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggiiran;
- e. pelaksanaan perbendaharaan dan penatausahaan penerimaan daerah bukan pajak, serta penyelesaian kerugian daerah;
- f. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- g. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- h. penyiapan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporsin Dinas;
- i. memproses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan-Langsung Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- j. menyusun bahan verifikasi atas laporan surat pertanggungjjawaban pelaksanaan APBD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- k. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan;
- l. menyusun bahan untuk pengesahan surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD guna dikirimkaji kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;

- m. menyiapkan bahan penyusunan jurnal penerimaan kas, jumlah pengeluaran kas, buku besar, jurnal umum dan laporan realisasi anggaran baik bulanan, semester maupun tahunan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- n. melakukan verifikasi dan pencatatan atas laporan penambahan atau pengurangan aset sebagai bahan pembuatan neraca berdasarkan mekanisme dan prosedur penatausahaan keuangan untuk memenuhi ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun;
- o. menyusun bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota;
 - b. penyusunan arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kabupaten/kota;
 - d. penyusunan rencana pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas:
- a. penyusunan rencana kebijakan teknis perparkiran di area rencana induk jaringan lalu lintas;
 - b. analisa terhadap integrasi .antar dan intra moda transportasi tingkat kota;
 - c. penyusunan rencana umum jaringan jalan kota;
 - d. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas angkutan jalan kota;
 - e. analisis penggunaan ruang udara;
 - f. pengawasan dan evaluasi terhadap perlintasan sebidang yang berada di kota;
 - g. pembangunan dan pengembangan fasilitas;
 - h. penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota;
 - i. pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan terteritu dan persimpangan;

- j. pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal tipe C;
- k. audit sistem keselamatan pada terminal;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- m. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- n. uji berkala kendaraan benmotor;
- o. pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor;
- p. pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
- q. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor;
- r. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- s. pengawasan dan pengelolaan kegiatan perparkiran;
- t. penyiapan, perencanaan, penentuan lokasi, pemberigin ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- u. memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- v. manajemen rekayasa lalu lintas;
- w. pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas;

- x. pemantauan dan pengawasan transportasi jalan;
- y. merumuskan kebijakan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- z. evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota;
- aa. pemrosesan pertimbangan analisa dampak lalu lintas;
- bb. penyediaan angkutan umum;
- cc. pelaksanaan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek serta barang, termasuk barang tertentu yang bersifat khusus;
- dd. penyusunan jaringan lintas angkutan barang;
- ee. survey penentuan rute angkutan;
- ff. penentuan lokasi halte;
- gg. penyediaan angkutan perkotaan;
- hh. sosialisasi terhadap pengemudi yang berkeselamatan;
- ii. sosialisasi tentang standar pelayanan minimal pada angkutan umum;
- jj. identifikasi kebutuhan sumberdaya manusia penangannan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi pada jabatan;
- kk. merencanakan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;

- ll. pengelolaan trayek angkutan umum;
- mm. survey asal dan tujuan trayek perkotaan;
- nn. survey jaringan jalan yang dilalui;
- oo. inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan;
- pp. inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan;
- qq. rapat koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas angkutan jalan kota dalam perumusan rencana umum jaringan trayek perkotaan yang berada dalam wilayah kota;
- rr. inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia penanganan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- ss. survey asal dan tujuan trayek pedesaan;
- tt. inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan pedesaan;
- uu. inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan pedesaan;
- vv. rapat koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas angkutan jalan;
- ww. rapat koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas angkutan jalan kabupaten dalam penyusunan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;

- xx. inventarisasi kebutuhan Sumber Daya Manusia penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- yy. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
- zz. inventarisasi perkiraan permintaan jasa Penumpang;
- aaa. inventarisasi jumlah kebutuhan Kendaraan;
- bbb. survey asal dan tujuan trayek;
- ccc. inventarisasi perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan;
- ddd. penertiban izin angkutan orang dalam trayek;
- eee. pengawasan dan evaluasi trayek angkutan umum;
- fff. izin penyelenggaraan taxi dalam kabupaten/kota;
- ggg. pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal pada armada;
- hhh. pengawasan dan evaluasi operasional angkutan;
- iii. survey asal dan tujuan penumpang;
- jjj. penetapan tarif kelas ekonomi;
- kkk. pengawasan dan evaluasi tarif angkutan;
- lll. penertiban ijin usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota;
- mmm. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota;

- nnn. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- ooo. pengelolaan izin trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan
- ppp. penyeberangan, angkutan sungai dan danau;
- qqq. pengelolaan izin usaha angkutan penyeberangan;
- rrr. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota;
- sss. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota;
- ttt. izin operasi perkeretaapian khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota;

D. Bidang Prasarana dan Keselamatan

- (1) Bidang Prasarana dan keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dirias yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis sarana perhubungan, penyelenggaraan, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Prasarana dan keselamatan mempunyai fungsi:
 - a. memberikan petunjuk/pedornari-pengadaan dan penempatan rambu-rambu dan fasilitas jalan;

- b. mengadakan kerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan perambuan dan fasilitas jalan;
 - c. melakukan uji laik fungsi jalan;
 - d. penyediaan fasilitas peralihan moda dari pengguna kendaraan pribadi ke pengguna kendaraan umum;
 - e. pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tertentu dan persimpangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Prasarana dan keselamatan mempunyai Uraian tugas:
- a. melaksanakan peninjauan lokasi untuk penetapan pembangunan halte dan terminal angkutan orang maupun angkutan barang;
 - b. audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten;
 - c. pelatihan safety drifting terhadap pengemudi angkutan kota;
 - d. sosialisasi tentang Sistem Manajemen Keselamatan;
 - e. penyusunan sistem manajemen keselamatan;
 - f. pelayanan proses pengurusan pembangunan pelabuhan;
 - g. penerbitan izin usaha terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - h. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - i. penerbitan Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul
 - j. lokal;
 - k. Izin usaha sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;

- l. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum .yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - m. Izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1(satu) Daerah kabupaten;
 - n. jumlah Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - o. stasiun kelas besar, sedang dan kecil pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
 - p. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
 - q. Izin prinsip pembangunan perkeretaapian khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten;
 - r. Izin pembangunan perkeretaapian khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten;
 - s. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - t. Pelaksanaari tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahkan:
- a) Seksi Prasarana;
 - (1) Seksi Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan teknis sarana perhubungan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja seksi sarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
- c. penyusunan rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten;
- d. penyusunan perencanaan perlengkapan jalan;
- e. pemasangan perlengkapan jalan;

(3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Prasarana mempunyai Uraian tugas:

- a. memberikan pengawasan, perawatan pengadaan dan penempatan rambu-rambu dan fasilitas jalan;
- b. mengadakan kerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan perambuan dan fasilitas jalan;
- c. melakukan uji laik fungsi jalan;
- d. penyediaan fasilitas peralihan moda dari pengguna kendaraan pribadi ke pengguna kendaraan umum;
- e. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan kota;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal terminal tipe e;
- g. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

- h. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- i. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, pembangunan;
- j. fasilitasi penentuan lokasi halte;
- k. fasilitasi merencanakan kebutuhan dan pengembangan sumbu daya manusia di bidang transportasi;
- l. fasilitasi pelayanan proses kepengurusan pembangunan pelabuhan;
- m. fasilitasi pembangunan, penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- n. penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- o. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- p. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan;
- q. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- r. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- s. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- t. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

- u. penerbitan ijin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas heli kopter;
- v. fasilitasi ijin usaha sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalumya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota;
- w. fasilitasi izin pembangunan prasaran perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota;
- x. fasilitasi izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota;
- y. fasilitasi stasiun kelas besar, sedang dan kecil pada jaringan jalur kereta api kabupaten / kota;
- z. penyusunan laporan kegiatan di. bidang tugasnya;

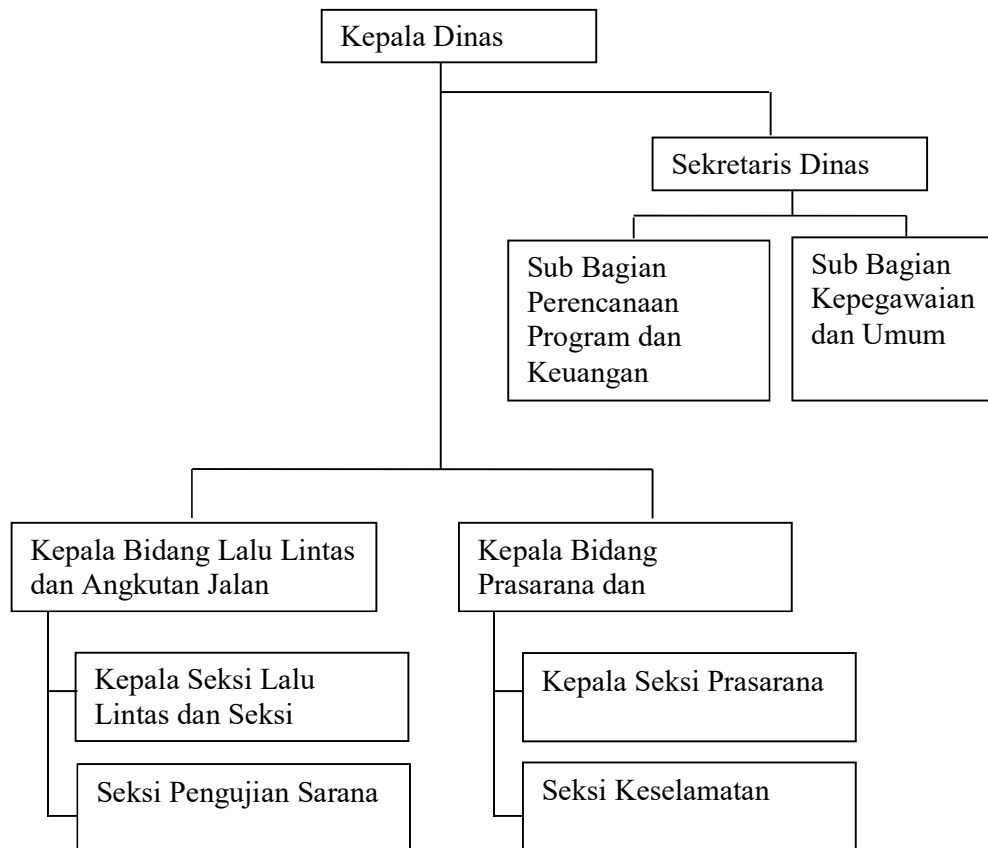
b) Seksi Keselamatan.

- (1) Seksi keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarsma dan Keselamatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi keselamatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi keselamatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi keselamatan mempunyai uraian tugas:

- a. pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas;
- b. penyusunan rencana penataan pengamanan dan pengendalian daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. penyusunan laporan dan analisis data kecelakaan lalu lintas;
- d. pengembangan manajemen keamanan dan keselamatan lalu lintas;
- e. fasilitasi pelatihan safety drifting terhadap pengemudi angkutan kota;
- f. fasilitasi sosialisasi terhadap pengemudi yang berkeselamatan;
- g. fasilitasi sosialisasi tentang standar pelayanan minimal pada angkutan umum;
- h. fasilitasi tentang sistem manajemen keselamatan;
- i. fasilitasi penyusunan sistem manajemen keselamatan;
- j. fasilitasi pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal pada armada;
- k. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- l. laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi;
- m. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan lingkungan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

- o. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Tahun 2026.

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

4.1.1.3 Keadaan Pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

Keberadaan pegawai adalah merupakan unsur yang sangat penting bagi suatu organisasi karena pegawai adalah sebagai pelaksana dari segala aktivitas organisasi, sehingga tanpa adanya pegawai mustahil organisasi itu ada.

Untuk mengetahui keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran berdasarkan Golongan berikut penulis sampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
KEADAAN DAN JUMLAH PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PANGANDARAN BERDASARKAN GOLONGAN

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	IV/c	1
2.	IV/a	3
3.	III/c	4
4.	III/b	3
5.	III/d	1
6.	III/a	0
7.	II/c	4
8.	II/b	7
9.	II/a	1
10.	Non PNS	37
Jumlah		61

Sumber : Bagian Kepegawaian, 2026

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran cukup memadai dengan tugas dan kewenangan yang ada pada sebuah organisasi. Adapun pegawai dengan pangkat paling tinggi yaitu Kepala Dinas dengan golongan IV/c dan pegawai yang paling rendah pangkat dan golongannya yaitu II/a sebanyak 1 orang. Dengan demikian, keadaan tersebut sangat menunjang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan, hal ini dikarenakan pegawai yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah memiliki pengalaman.

Selanjutnya berikut penulis sampaikan keadaan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran berdasarkan tingkat pendidikan, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	2
2.	Sarjana (S1)	24
3.	Sarjana Muda/Diploma/Sederajat	4
4.	SMA/Sederajat	31
5.	SMP/Sederajat	0
6.	SD/Sederajat	0
Jumlah		61

Sumber : Bagian Kepegawaian, 2026

Dilihat dari tingkat Pendidikan, pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran paling banyak adalah berlatar belakang pendidikan SMA/ sederajat. Dengan demikian masih perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan cara peningkatan jenjang Pendidikan. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya tingkat pendidikan pegawai yang berbeda diharapkan dapat saling mengisi kekurangan dari masing-masing pegawai sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan komitmen terhadap organisasi.

Selanjutnya berikut penulis sampaikan keadaan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
KEADAAN DAN JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS
KELAMIN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	49
2.	Wanita	12
J u m l a h		61

Sumber : Bagian Kepegawaian, 2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keadaan dan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran didominasi oleh pegawai laki-laki dengan jumlah 49 orang. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan banyaknya pegawai laki-laki diharapkan dapat lebih optimal dalam mengerjakan pekerjaannya dan dapat lebih memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan komitmen terhadap organisasi.

Selanjutnya berikut penulis sampaikan keadaan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran berdasarkan masa kerja sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN MASA KERJA DI DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN

No	Masa kerja/Tahun	Jumlah
1.	0-5	10
2.	6-10	23
3.	11-15	13
4.	16-20	5
5.	21-25	2
6.	26-30	2
7.	31-35	6
Jumlah		61

Sumber : Bagian Kepegawaian, 2026

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa masa kerja yang paling lama adalah 31-35 tahun sebanyak 6 orang, 26-30 tahun dengan jumlah pegawai 2

orang, 21-25 tahun sebanyak 2 orang, 6-10 tahun sebanyak 23 orang, sedangkan masa kerja terbaru 0-5 tahun sebanyak 1 orang pegawai. Selanjutnya jumlah pegawai paling banyak adalah pada masa kerja selama 6-10 tahun dengan jumlah 23 orang. Dengan demikian, mencerminkan pegawai mampu memiliki keahlian dan kemampuan dalam bekerja karena masa kerja pegawai cukup lama sehingga diharapkan dapat meningkatkan komitmennya terhadap organisasi.

Selanjutnya penulis sampaikan keadaan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran berdasarkan usia sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN

No	Tingkat Usia Pegawai/Tahun	Jumlah
1	20 – 28	0
2	29 – 36	8
3	37 – 44	42
4	45 – 52	9
5	53 – 60	2
	Jumlah	61

Sumber : Bagian Kepegawaian, 2026

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai berusia 37-44 tahun sebanyak 42 orang dan usia diantara 29 – 36 tahun sebanyak 8 orang dan usia 45-52 sebanyak 9 orang serta sisanya usia 53-60 tahun sebanyak 2 orang. Berdasarkan tabel tersebut maka sebagian besar pegawai masih berusia produktif sehingga masih mampu bekerja secara produktif dan dapat berkomitmen terhadap pelaksanaan pekerjaannya.

4.1.1.4 Karakteristik Informan

Untuk membahas mengenai permasalahan dalam penelitian ini maka penulis memperoleh informasi dari informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran sebanyak 6 orang

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh beberapa karakteristik informan dilihat dari segi jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan. Berikut diuraikan pada bagian di bawah ini.

Tabel 4.14
KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin	Frekuensi
Laki-laki	5
Perempuan	0
Jumlah	5

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua informan dalam penelitian ini adalah laki-laki sehingga diharapkan dengan informan laki-laki dapat memberikan informasi yang jelas dan membantu kelancaran penulis dalam memperoleh informasi terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 4.15
KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN UMUR

Usia	Frekuensi
20-27	-
28-38	1
39-49	3
50-55	1
Jumlah	5

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar rentang usia informan berada pada usia 39-49 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa informan pada usia ini memiliki tingkat usia produktif dan mobilitas masih tinggi sehingga dapat memberikan informasi terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 4.16
KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	-
2	S1	3
3	Diploma	1
4	SMA	1
	Jumlah	5

Sumber: Data Diolah dari hasil wawancara, 2026

Sehubungan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan menyangkut tingkat pendidikan informan diketahui bahwa sebagai besar informan memiliki pendidikan sarjana dan sarjana muda sehingga diharapkan dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya dapat memberikan informasi kepada penulis terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran,

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.2.1 Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diikuti dengan proses

pelaksanaan yang baik. Implementasi kebijakan menjadi tahapan penting karena menjadi jembatan antara aturan yang dibuat pemerintah dengan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. Melalui implementasi, suatu kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang melibatkan aparatur pemerintah, pihak pelaksana, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan tempat parkir tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi yang mengatur, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengelola sumber daya, membangun koordinasi, melakukan pengawasan, serta mendorong keterlibatan masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Untuk mengetahui Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dilakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang antara lain :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir, karena melalui komunikasi setiap pihak yang terlibat dapat memahami tujuan, aturan, serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pengelolaan parkir, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi dari pemerintah kepada petugas pelaksana, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna layanan parkir. Penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami akan membantu menciptakan kesamaan pemahaman antara pemerintah, petugas parkir, dan

masyarakat sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, komunikasi diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti sosialisasi mengenai aturan parkir, koordinasi antarpetugas, pemberian arahan kepada pengelola parkir, serta penyampaian informasi kepada masyarakat terkait lokasi parkir, tata cara parkir, dan ketentuan yang berlaku. Komunikasi yang efektif diperlukan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam menggunakan fasilitas parkir, sementara petugas pelaksana memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Namun demikian, proses komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir juga dapat menghadapi berbagai hambatan, seperti kurang optimalnya penyebaran informasi, keterbatasan media sosialisasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan parkir, serta kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan perbedaan pemahaman yang berdampak pada ketidaktertiban dalam pelaksanaan parkir di lapangan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan perlu membangun komunikasi yang berkelanjutan, baik melalui sosialisasi langsung, pemanfaatan media informasi, maupun penguatan koordinasi dengan petugas dan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan pengelolaan parkir tidak

hanya dipahami sebagai aturan pemerintah, tetapi juga menjadi bentuk pelayanan publik yang dapat didukung bersama untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

Untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam menyampaikan kebijakan pengelolaan tempat parkir kepada pihak pelaksana dan masyarakat, sehingga tujuan dan aturan kebijakan tersebut dapat dipahami serta dilaksanakan dengan baik, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Komunikasi kebijakan pengelolaan tempat parkir dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pimpinan, petugas pelaksana, hingga masyarakat. Penyampaian kebijakan kepada petugas dilakukan melalui arahan, koordinasi, dan pembinaan agar setiap pelaksana memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dilakukan dalam mengelola parkir di lapangan. Hal tersebut menjadi penting mengingat Kabupaten Pangandaran merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki tingkat aktivitas kendaraan cukup tinggi, terutama pada hari libur dan musim kunjungan wisata. Dengan komunikasi yang baik, petugas diharapkan mampu menjalankan perannya dalam mengatur kendaraan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga ketertiban pada lokasi parkir. Selain itu, komunikasi kepada masyarakat terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pengelolaan parkir bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas bersama.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Komunikasi internal dilakukan melalui koordinasi rutin antara pimpinan dan petugas pelaksana. Penyampaian informasi tersebut berkaitan dengan pembagian tugas, pengaturan lokasi parkir, tata cara pelayanan, serta langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi permasalahan di lapangan. Komunikasi yang terjalin membantu petugas memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih terarah. Sebagai contoh, ketika terjadi

peningkatan jumlah kendaraan pada kawasan wisata Pantai Pangandaran, petugas yang telah memperoleh arahan sebelumnya dapat lebih siap melakukan pengaturan arus kendaraan dan penataan area parkir agar tidak terjadi kepadatan yang mengganggu kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Komunikasi kebijakan kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan pemberian pemahaman dan pelayanan. Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas tidak hanya bertugas mengatur kendaraan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir. Misalnya, ketika terdapat pengguna kendaraan yang memarkir kendaraannya di bahu jalan atau lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir, petugas memberikan arahan secara langsung mengenai dampak yang dapat ditimbulkan, seperti menghambat arus lalu lintas dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Pendekatan komunikasi yang dilakukan secara persuasif dinilai lebih mampu membangun kesadaran masyarakat dibandingkan hanya memberikan teguran.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir juga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan aktivitas parkir, seperti pengelola kawasan wisata, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar. Kerja sama tersebut diperlukan karena pengelolaan parkir tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai unsur yang berada di sekitar lokasi parkir. Sebagai contoh, pada kawasan wisata yang mengalami peningkatan kunjungan, koordinasi dengan pihak sekitar dapat membantu memberikan informasi kepada pengunjung mengenai lokasi parkir yang tersedia sehingga kendaraan dapat tertata lebih baik dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Salah satu tantangan dalam komunikasi kebijakan pengelolaan parkir adalah belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beragamnya karakteristik

masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kabupaten Pangandaran, terutama wisatawan yang baru pertama kali berkunjung dan belum mengetahui lokasi maupun aturan parkir yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, masih ditemukan kendaraan yang berhenti atau parkir pada lokasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas karena kurangnya informasi yang diterima oleh pengguna kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi melalui berbagai media, seperti pemasangan rambu yang lebih jelas, pemanfaatan media sosial, serta sosialisasi secara langsung pada lokasi-lokasi yang memiliki aktivitas parkir tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa komunikasi kebijakan dalam implementasi pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah dilakukan melalui berbagai bentuk, mulai dari koordinasi internal, pembinaan petugas, sosialisasi masyarakat, hingga kerja sama dengan pihak terkait. Komunikasi tersebut menjadi faktor pendukung karena mampu membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah, pelaksana, dan masyarakat. Namun demikian, peningkatan kualitas dan jangkauan komunikasi masih diperlukan agar seluruh pengguna layanan parkir dapat memahami aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa komunikasi kebijakan pengelolaan tempat parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah terlihat melalui adanya penyampaian arahan kepada petugas di lapangan, pemasangan rambu atau tanda informasi parkir pada beberapa lokasi, serta interaksi langsung antara petugas dengan masyarakat pengguna layanan parkir. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petugas berupaya memberikan arahan kepada pengendara, terutama ketika terjadi kepadatan kendaraan pada

kawasan yang memiliki aktivitas tinggi seperti kawasan wisata. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal, seperti masih adanya pengguna kendaraan yang belum memahami lokasi parkir yang diperbolehkan atau memanfaatkan area yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih intensif, penggunaan media informasi yang mudah dipahami, serta pendekatan komunikasi yang berkelanjutan agar seluruh masyarakat dapat memahami dan mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa komunikasi kebijakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang dilakukan melalui koordinasi internal, pengarahan kepada petugas, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan pihak terkait telah membantu menciptakan pemahaman mengenai tujuan dan aturan pengelolaan parkir. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam memperluas jangkauan penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat dan pengguna kendaraan, mengingat karakteristik Kabupaten Pangandaran sebagai daerah wisata dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih konsisten, mudah dipahami, dan dilakukan secara berkelanjutan agar

kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat dilaksanakan secara lebih efektif serta mampu menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir, sumber daya mencakup berbagai unsur pendukung, seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, sumber daya manusia menjadi unsur utama karena aparaturnya dan petugas parkir merupakan pihak yang secara langsung melaksanakan kebijakan di lapangan. Kemampuan, pemahaman, dan kompetensi petugas sangat menentukan kualitas pelayanan parkir yang diberikan kepada masyarakat. Petugas yang memiliki pengetahuan mengenai aturan parkir, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu memberikan pelayanan secara profesional akan mendukung terciptanya pengelolaan parkir yang tertib dan efektif.

Selain sumber daya manusia, ketersediaan anggaran juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir. Anggaran diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti sosialisasi kebijakan, pembinaan petugas, pengawasan, pemeliharaan fasilitas parkir, serta

pengembangan sistem pengelolaan parkir. Keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan karena dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program peningkatan pelayanan parkir.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Pengelolaan parkir yang baik membutuhkan fasilitas seperti marka parkir, rambu-rambu parkir, lokasi parkir yang jelas, serta sarana pengawasan yang memadai. Fasilitas tersebut berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus membantu petugas dalam melakukan penataan dan pengendalian aktivitas parkir di lapangan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan sumber daya, seperti keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan, kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur, serta belum optimalnya fasilitas pendukung di beberapa lokasi parkir. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan apabila tidak segera ditangani melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran perlu memastikan bahwa sumber daya manusia memiliki kemampuan yang sesuai, dukungan anggaran tersedia secara optimal, serta fasilitas pendukung dapat memenuhi kebutuhan pelayanan parkir. Dengan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir diharapkan mampu berjalan lebih

efektif, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna fasilitas parkir.

Untuk mengetahui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

sumber daya menjadi bagian yang sangat diperhatikan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir. Ketersediaan aparatur dan petugas lapangan menjadi faktor utama karena mereka merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan kondisi parkir di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan terus berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas yang jelas, pemberian arahan, serta peningkatan kemampuan petugas agar mampu menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan secara baik. Selain itu, dukungan anggaran juga menjadi unsur penting untuk menunjang berbagai kegiatan, seperti operasional petugas, pemeliharaan fasilitas parkir, serta kegiatan pengawasan di lapangan. Meskipun demikian, dengan luas wilayah Kabupaten Pangandaran dan tingginya aktivitas kendaraan terutama pada kawasan wisata, kebutuhan sumber daya masih perlu terus disesuaikan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan parkir telah memiliki pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Petugas di lapangan memiliki peran dalam melakukan pengaturan kendaraan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta membantu menjaga ketertiban lokasi parkir. Menurut hasil wawancara, keberadaan petugas sangat membantu terutama pada saat terjadi peningkatan jumlah kendaraan, seperti pada akhir pekan atau musim liburan. Namun, kondisi di lapangan terkadang membutuhkan jumlah petugas yang lebih banyak

karena beberapa titik parkir mengalami peningkatan aktivitas dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan penyesuaian jumlah personel agar pengawasan dan pelayanan dapat dilakukan secara lebih maksimal.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Pemanfaatan sumber daya anggaran sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir. Anggaran yang tersedia digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional, seperti kegiatan pengawasan, pembinaan petugas, penyediaan perlengkapan kerja, serta pemeliharaan fasilitas pendukung parkir. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan yang paling mendukung pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat tantangan dalam pemenuhan seluruh kebutuhan karena pelaksanaan pengelolaan parkir membutuhkan dukungan biaya yang berkelanjutan, terutama untuk peningkatan fasilitas dan pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan tempat parkir. Ketersediaan fasilitas seperti rambu parkir, marka jalan, perlengkapan petugas, serta informasi mengenai lokasi parkir sangat membantu masyarakat dalam memahami aturan dan menggunakan fasilitas parkir dengan benar. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi sarana pendukung belum sepenuhnya merata pada seluruh lokasi parkir, terutama pada beberapa kawasan yang memiliki peningkatan aktivitas kendaraan. Sebagai contoh, pada saat terjadi lonjakan kunjungan wisata, kebutuhan terhadap fasilitas pendukung seperti petunjuk arah parkir dan pengaturan ruang parkir menjadi lebih besar agar kendaraan dapat tertata dengan baik dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Optimalisasi sumber daya dalam pengelolaan parkir masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam aspek pemanfaatan teknologi dan sistem pengawasan. Penggunaan sarana pendukung yang lebih modern dapat membantu petugas dalam melakukan pemantauan dan pengendalian

aktivitas parkir secara lebih efektif. Selain itu, peningkatan kemampuan petugas melalui pelatihan juga diperlukan agar mereka mampu menghadapi berbagai situasi di lapangan, seperti kepadatan kendaraan pada lokasi wisata atau adanya masyarakat yang belum memahami aturan parkir. Dengan sumber daya manusia yang lebih siap dan dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat berjalan lebih tertib dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Dari sisi sumber daya manusia, keberadaan aparatur dan petugas lapangan telah membantu dalam melaksanakan kegiatan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan parkir, namun dengan semakin tingginya aktivitas kendaraan terutama pada kawasan wisata, kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas dan jumlah petugas masih menjadi perhatian. Dari sisi anggaran, dukungan pembiayaan telah dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional, pembinaan petugas, serta pemeliharaan fasilitas pendukung, tetapi diperlukan pengelolaan yang lebih optimal agar mampu memenuhi kebutuhan pengembangan sistem pengelolaan parkir. Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, keberadaan fasilitas seperti rambu parkir, marka, serta perlengkapan pendukung telah membantu pelaksanaan kebijakan, namun masih diperlukan peningkatan dan pemerataan fasilitas pada beberapa lokasi agar pelayanan parkir dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir, karena semakin baik ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki,

maka semakin optimal pula kemampuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam mewujudkan pengelolaan parkir yang tertib, aman, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah terlihat melalui keterlibatan petugas di lapangan dalam melakukan pengaturan kendaraan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan pada lokasi parkir yang memiliki tingkat aktivitas tinggi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petugas telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, terutama pada kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan. Selain itu, telah tersedia beberapa sarana pendukung seperti rambu-rambu parkir, marka atau tanda lokasi parkir, serta perlengkapan kerja petugas yang membantu pelaksanaan pengelolaan parkir. Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas pada waktu-waktu tertentu, belum optimalnya ketersediaan fasilitas pendukung pada beberapa titik parkir, serta kebutuhan peningkatan sistem pengawasan agar mampu menjangkau seluruh wilayah yang menjadi lokasi aktivitas parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah mendukung implementasi kebijakan, tetapi masih memerlukan penguatan dan pengembangan agar pelaksanaan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sumber daya pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, baik melalui ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, maupun pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Keberadaan petugas yang menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan, dukungan pembiayaan operasional, serta fasilitas pendukung parkir telah membantu proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi masih ditemukan beberapa kebutuhan yang perlu diperkuat, seperti peningkatan kapasitas dan jumlah petugas, pemerataan fasilitas pendukung parkir, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya menjadi hal yang penting agar Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran mampu melaksanakan kebijakan pengelolaan tempat parkir secara lebih maksimal, sehingga dapat menciptakan pelayanan parkir yang tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sebaik apapun kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah, apabila tidak didukung oleh sikap, komitmen, dan kesungguhan dari pihak yang melaksanakan kebijakan, maka tujuan yang telah ditetapkan akan sulit untuk tercapai. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir, disposisi pelaksana berkaitan dengan bagaimana

pemahaman, tanggung jawab, kepatuhan, serta kemauan aparaturnya dan petugas parkir dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, sikap pelaksana menjadi faktor yang sangat menentukan karena petugas di lapangan berhadapan langsung dengan kondisi nyata dalam penyelenggaraan parkir. Petugas tidak hanya dituntut untuk memahami ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi juga harus memiliki sikap profesional dalam memberikan pelayanan, melakukan penataan kendaraan, menjaga ketertiban, serta melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas parkir yang berlangsung di masyarakat.

Komitmen pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan parkir dapat terlihat dari kesungguhan dalam menjalankan tugas, kedisiplinan dalam melaksanakan tanggung jawab, serta kesediaan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Petugas yang memiliki pemahaman dan komitmen yang baik akan lebih mudah menerapkan kebijakan secara konsisten, sehingga mampu menciptakan pengelolaan parkir yang tertib dan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.

Namun dalam pelaksanaannya, sikap pelaksana juga dapat menjadi salah satu faktor penghambat apabila terdapat kurangnya kedisiplinan, rendahnya kepatuhan terhadap aturan, atau belum optimalnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas pelayanan parkir dan menyebabkan adanya perbedaan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan, pengawasan,

serta peningkatan motivasi bagi para pelaksana agar memiliki sikap yang sejalan dengan tujuan kebijakan.

Dengan demikian, disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui sikap pelaksana yang profesional, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap pelayanan masyarakat, kebijakan pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dapat berjalan lebih efektif serta mampu mewujudkan sistem parkir yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Untuk mengetahui sikap, komitmen, tanggung jawab, dan kepatuhan pelaksana kebijakan dalam menjalankan pengelolaan tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Sikap dan komitmen pelaksana menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir. Pelaksana kebijakan dituntut tidak hanya memahami aturan yang berlaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas diarahkan untuk menjalankan tugas dengan disiplin, memberikan pelayanan secara baik, serta mampu menjaga hubungan yang positif dengan masyarakat pengguna parkir. Komitmen tersebut diperlukan karena petugas parkir merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan menjadi gambaran dari kualitas pelayanan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembinaan dan evaluasi terus dilakukan agar setiap pelaksana memiliki sikap kerja yang sesuai dengan nilai-nilai pelayanan publik.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Sebagian besar pelaksana telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Petugas memahami bahwa pengelolaan parkir bukan hanya berkaitan dengan mengatur kendaraan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Sikap ramah dan komunikatif menjadi hal yang penting ketika berinteraksi dengan pengguna parkir, terutama ketika memberikan arahan atau teguran kepada masyarakat yang belum mematuhi aturan. Sebagai contoh, ketika terdapat kendaraan yang parkir di lokasi yang tidak diperbolehkan, petugas berupaya memberikan penjelasan terlebih dahulu agar masyarakat memahami alasan adanya pengaturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga berusaha membangun kesadaran masyarakat.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan terlihat dari kesediaan petugas untuk tetap menjalankan tugas meskipun menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Pengelolaan parkir di Kabupaten Pangandaran memiliki tantangan tersendiri karena adanya peningkatan aktivitas kendaraan pada waktu tertentu, khususnya saat musim liburan dan meningkatnya kunjungan wisatawan. Dalam kondisi tersebut, petugas tetap berusaha melakukan pengaturan kendaraan dan menjaga ketertiban agar tidak terjadi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sikap tanggung jawab tersebut menjadi bentuk komitmen pelaksana dalam mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan parkir.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Kepatuhan pelaksana terhadap ketentuan yang telah ditetapkan menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan. Petugas diarahkan untuk menjalankan tugas sesuai prosedur, mulai dari pengaturan lokasi parkir, pemberian pelayanan, hingga pelaporan apabila ditemukan permasalahan di lapangan. Menurut hasil wawancara, kepatuhan terhadap aturan tidak hanya diperlukan untuk menjaga ketertiban administrasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika petugas mampu menunjukkan sikap disiplin dan menjalankan tugas sesuai aturan, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan yang diterapkan.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir masih terdapat tantangan yang berkaitan dengan konsistensi sikap dan kedisiplinan pelaksana. Meskipun secara umum petugas telah menjalankan tugas dengan baik, kondisi di lapangan yang dinamis terkadang membutuhkan kemampuan adaptasi dan kesabaran yang tinggi. Misalnya, ketika menghadapi masyarakat yang kurang memahami aturan parkir atau terjadi kepadatan kendaraan pada lokasi tertentu, petugas harus mampu mengendalikan situasi dengan tetap mengedepankan sikap profesional. Oleh karena itu, peningkatan pembinaan dan penguatan komitmen pelaksana tetap diperlukan agar kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa sikap, komitmen, tanggung jawab, dan kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah menunjukkan peran yang cukup penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana pada dasarnya telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kedisiplinan, pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta kesungguhan dalam menjaga ketertiban parkir di lapangan. Sikap profesional dan tanggung jawab petugas terlihat dari upaya mereka dalam melakukan pengaturan kendaraan, memberikan arahan kepada pengguna parkir, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul saat pelaksanaan tugas. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti menjaga konsistensi kedisiplinan seluruh pelaksana, meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai karakteristik masyarakat, serta memperkuat pembinaan agar komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan tetap terjaga.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa sikap, komitmen, tanggung jawab, dan kepatuhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah terlihat melalui aktivitas petugas di lapangan dalam melakukan pengaturan kendaraan, memberikan arahan kepada pengguna parkir, serta menjaga ketertiban pada lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petugas telah berupaya menjalankan tugas secara tertib dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, seperti mengarahkan kendaraan agar parkir pada lokasi yang sesuai dan membantu mengatur kondisi ketika terjadi peningkatan jumlah kendaraan, khususnya pada kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan. Selain itu, terlihat adanya upaya petugas untuk memberikan pelayanan secara komunikatif dan persuasif kepada masyarakat ketika ditemukan pelanggaran atau ketidakteraturan parkir. Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan kedisiplinan dan konsistensi pelaksana, terutama dalam menghadapi kondisi lapangan yang dinamis serta tingginya aktivitas kendaraan pada waktu tertentu.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sikap dan komitmen pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana telah menunjukkan tanggung jawab melalui pelaksanaan tugas, kepatuhan terhadap aturan, serta upaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sikap profesional, kedisiplinan, dan kesungguhan petugas dalam melakukan pengaturan serta

pengawasan parkir menjadi bagian penting dalam menciptakan ketertiban di lapangan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan secara berkelanjutan melalui pembinaan, evaluasi kinerja, dan penguatan komitmen agar seluruh pelaksana mampu menjaga konsistensi dalam menjalankan tugas, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika seperti peningkatan aktivitas kendaraan dan beragam karakteristik masyarakat pengguna layanan parkir. Dengan adanya pelaksana yang memiliki sikap positif dan komitmen yang kuat, implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan lebih optimal serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik

4. Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan tata kerja, pembagian tugas, kewenangan, serta mekanisme koordinasi antarbagian dalam suatu organisasi. Struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan setiap pelaksana memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang kurang efektif dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, struktur birokrasi berperan dalam mengatur bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi kegiatan operasional. Hal tersebut mencakup pembagian tugas antara aparatur Dinas Perhubungan, petugas

pengelola parkir, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan perparkiran. Kejelasan tugas dan kewenangan menjadi hal yang penting agar setiap pihak dapat menjalankan fungsi masing-masing secara optimal dan tidak terjadi ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Selain pembagian tugas, keberadaan standar operasional prosedur (SOP) juga menjadi bagian penting dalam struktur birokrasi. SOP menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan kegiatan pengelolaan parkir, mulai dari penataan lokasi parkir, pelayanan kepada masyarakat, pengawasan, hingga penanganan terhadap pelanggaran aturan parkir. Dengan adanya prosedur yang jelas, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih konsisten dan meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelayanan.

Koordinasi antarorganisasi juga menjadi unsur penting dalam struktur birokrasi pengelolaan parkir. Dinas Perhubungan perlu membangun hubungan kerja yang baik dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola kawasan wisata, petugas parkir, serta masyarakat. Koordinasi yang baik akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan serta memperkuat efektivitas pengawasan di lapangan.

Namun demikian, dalam praktiknya struktur birokrasi juga dapat menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait, keterbatasan mekanisme pengawasan, atau belum maksimalnya penerapan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan

baik, maka dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir.

Oleh karena itu, penguatan struktur birokrasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kabupaten Pangandaran. Melalui pembagian tugas yang jelas, penerapan SOP yang konsisten, serta koordinasi yang berkelanjutan, Dinas Perhubungan dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih efektif dalam memberikan pelayanan publik dan menciptakan pengelolaan parkir yang tertib, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mengetahui struktur birokrasi, pembagian tugas, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir didukung oleh struktur birokrasi yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Setiap bagian memiliki peran sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, mulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan parkir di lapangan. Kejelasan struktur tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara sistematis dan setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani oleh pihak yang memiliki kewenangan. Selain itu, penerapan SOP menjadi pedoman bagi petugas agar dalam menjalankan tugas tetap memiliki standar pelayanan yang sama, baik dalam melakukan pengaturan parkir maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi antarbagian juga terus dilakukan untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama pada lokasi yang memiliki tingkat aktivitas kendaraan tinggi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Pembagian tugas dalam pengelolaan tempat parkir telah dilakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing petugas. Setiap pelaksana memahami perannya, baik dalam melakukan pengawasan, mengatur kendaraan, memberikan informasi kepada masyarakat, maupun menyampaikan laporan apabila terdapat kendala di lapangan. Menurut hasil wawancara, adanya pembagian tugas yang jelas membantu petugas bekerja lebih terarah karena setiap orang mengetahui apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus berkoordinasi ketika menghadapi permasalahan. Sebagai contoh, ketika terjadi kepadatan kendaraan pada kawasan wisata, petugas di lapangan dapat langsung melakukan pengaturan sementara dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar kondisi dapat segera dikendalikan.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

SOP menjadi salah satu pedoman penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir. SOP tersebut membantu petugas memahami tahapan kerja yang harus dilakukan, mulai dari penempatan kendaraan, pelayanan kepada pengguna parkir, hingga proses pelaporan apabila ditemukan permasalahan. Dengan adanya SOP, pelaksanaan tugas menjadi lebih terarah dan mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan cara kerja antarpetugas. Namun demikian, penerapan SOP tetap membutuhkan penyesuaian dengan kondisi nyata di lapangan, karena karakteristik lokasi parkir di Kabupaten Pangandaran cukup beragam, terutama pada kawasan wisata yang memiliki perubahan jumlah kendaraan secara cepat. Oleh karena itu, petugas perlu memiliki kemampuan untuk menerapkan prosedur secara fleksibel tanpa mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Mekanisme koordinasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir. Koordinasi dilakukan secara internal antarpegawai maupun dengan pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas parkir, seperti pengelola kawasan, aparat terkait, dan masyarakat sekitar. Komunikasi dan koordinasi tersebut diperlukan agar berbagai permasalahan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti. Sebagai contoh, ketika terjadi kepadatan kendaraan pada lokasi wisata tertentu,

koordinasi antarpetugas membantu menentukan langkah yang tepat, seperti mengarahkan kendaraan ke lokasi parkir alternatif atau melakukan pengaturan arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Struktur birokrasi dan koordinasi yang diterapkan telah membantu pelaksanaan pengelolaan parkir, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan seluruh petugas tetap memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan dan prosedur kerja, terutama ketika menghadapi situasi yang berubah-ubah. Dalam kondisi tertentu, seperti meningkatnya jumlah wisatawan pada hari libur, diperlukan koordinasi yang lebih intensif agar seluruh petugas dapat bergerak secara bersama-sama. Oleh karena itu, evaluasi rutin, komunikasi antarbagian, serta penguatan pemahaman terhadap SOP menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah berjalan sebagai salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Kejelasan pembagian tugas, keberadaan standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme koordinasi antarpegawai telah membantu pelaksana memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan tugas di lapangan. Setiap petugas memiliki acuan kerja yang menjadi pedoman dalam melakukan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan parkir sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah. Selain itu, koordinasi yang dilakukan secara internal maupun dengan pihak terkait turut membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul, terutama pada lokasi dengan tingkat aktivitas

kendaraan yang tinggi. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam aspek koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SOP agar seluruh pelaksana memiliki pemahaman dan standar kerja yang sama dalam menghadapi dinamika pengelolaan parkir di Kabupaten Pangandaran.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah terlihat melalui adanya pembagian tugas dan peran petugas di lapangan dalam melaksanakan kegiatan pengaturan, pelayanan, serta pengawasan parkir. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petugas telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing, seperti mengarahkan kendaraan pada lokasi parkir yang tersedia, memberikan informasi kepada pengguna kendaraan, serta melakukan pengendalian ketika terjadi kepadatan kendaraan. Selain itu, terlihat adanya mekanisme koordinasi antarpetugas, terutama ketika menghadapi kondisi tertentu seperti meningkatnya jumlah kendaraan pada kawasan wisata atau terjadi permasalahan ketidakteraturan parkir. Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa penerapan prosedur kerja masih membutuhkan penguatan, terutama dalam memastikan seluruh petugas menjalankan standar pelayanan secara konsisten pada setiap lokasi parkir. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah mendukung implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir, tetapi masih diperlukan peningkatan koordinasi, evaluasi, dan penguatan pemahaman terhadap SOP agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kejelasan pembagian tugas, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme koordinasi yang dilakukan antarpegawai telah membantu menciptakan alur kerja yang lebih terarah dalam pelaksanaan pengelolaan parkir. Struktur birokrasi yang baik memungkinkan setiap pelaksana memahami tanggung jawabnya, sehingga kegiatan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan parkir dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan koordinasi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama serta mampu menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan berbagai kondisi di lapangan, terutama pada kawasan yang mengalami peningkatan aktivitas kendaraan. Oleh karena itu, optimalisasi struktur birokrasi menjadi hal penting agar implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan, namun belum optimal. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah didukung oleh beberapa aspek penting, seperti komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang menjadi dasar dalam menjalankan pengelolaan parkir di

lapangan. Dari aspek komunikasi, Dinas Perhubungan telah melakukan penyampaian informasi melalui koordinasi internal, pembinaan petugas, dan sosialisasi kepada masyarakat, meskipun jangkauan penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh pengguna layanan parkir memiliki pemahaman yang sama. Dari aspek sumber daya, keberadaan petugas, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana telah membantu pelaksanaan kebijakan, namun masih terdapat kebutuhan penguatan terutama dalam penambahan kapasitas petugas dan peningkatan fasilitas pendukung pada beberapa lokasi parkir. Dari aspek sikap dan komitmen pelaksana, petugas telah menunjukkan tanggung jawab dan kepatuhan dalam menjalankan tugas, tetapi konsistensi pelaksanaan masih perlu terus diperkuat melalui pembinaan dan evaluasi. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas, SOP, dan koordinasi telah tersedia sebagai pedoman pelaksanaan, namun masih diperlukan peningkatan koordinasi agar pelaksanaan kebijakan lebih seragam dan efektif.

4.1.2.2 Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Keberhasilan pengelolaan parkir sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan komunikasi yang efektif antara pemerintah, petugas pelaksana, dan masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta

komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan parkir juga menjadi faktor pendukung dalam menciptakan ketertiban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas, belum optimalnya fasilitas pendukung, kurangnya sosialisasi kebijakan, lemahnya pengawasan, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap aturan parkir. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan manajemen pemerintahan melalui peningkatan koordinasi, pembinaan pelaksana, optimalisasi pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat berjalan secara efektif, tertib, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dilakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang antara lain :

1. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir. Melalui komunikasi yang baik, pemerintah dapat menyampaikan tujuan, aturan, mekanisme pelaksanaan, serta tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat, baik aparatur Dinas Perhubungan, petugas parkir, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Kejelasan informasi mengenai kebijakan parkir akan menciptakan pemahaman yang sama sehingga setiap pihak dapat menjalankan

perannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, komunikasi menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya berhenti pada dokumen aturan, tetapi dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

Sebagai faktor pendukung, komunikasi kebijakan yang dilakukan secara efektif dapat memperkuat pelaksanaan pengelolaan tempat parkir. Penyampaian informasi melalui sosialisasi, koordinasi antarpetugas, pembinaan pengelola parkir, serta edukasi kepada masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap aturan parkir. Komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan juga dapat membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya mematuhi ketentuan parkir demi terciptanya ketertiban lalu lintas dan kenyamanan bersama.

Namun, komunikasi kebijakan juga dapat menjadi faktor penghambat apabila proses penyampaian informasi belum berjalan secara optimal. Kurangnya sosialisasi, keterbatasan media informasi, perbedaan pemahaman antara pelaksana dan masyarakat, serta belum meratanya penyampaian kebijakan kepada seluruh pengguna layanan parkir dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Kondisi tersebut dapat terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memahami aturan parkir, seperti penggunaan lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi kebijakan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan

tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Komunikasi yang dilakukan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami perlu terus dikembangkan melalui berbagai pendekatan, baik secara langsung maupun melalui pemanfaatan media informasi. Dengan komunikasi kebijakan yang efektif, diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pelaksana dan masyarakat sehingga pengelolaan tempat parkir dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan tujuan pelayanan publik.

Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat proses komunikasi kebijakan pengelolaan tempat parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam menyampaikan informasi, aturan, serta tujuan kebijakan kepada pelaksana maupun masyarakat, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Salah satu faktor yang mendukung komunikasi kebijakan pengelolaan tempat parkir adalah adanya komitmen dari internal Dinas Perhubungan untuk menyampaikan kebijakan secara jelas kepada seluruh pelaksana. Penyampaian informasi dilakukan melalui koordinasi, rapat internal, serta pengarahan kepada petugas agar setiap pelaksana memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait juga menjadi faktor pendukung karena pengelolaan parkir membutuhkan kerja sama antarinstansi. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam proses komunikasi, terutama dalam menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Kabupaten Pangandaran memiliki karakteristik sebagai daerah wisata dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga tidak semua pengguna kendaraan memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap aturan parkir. Kondisi tersebut menyebabkan sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus agar pesan kebijakan dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

faktor pendukung komunikasi kebijakan berasal dari adanya koordinasi yang cukup baik antara pimpinan dan petugas pelaksana di lapangan. Arahan yang diberikan sebelum pelaksanaan tugas membantu petugas memahami aturan dan langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan. Komunikasi secara langsung juga memudahkan petugas dalam menyampaikan kendala yang ditemukan selama menjalankan tugas sehingga dapat segera dicarikan solusi. Namun, hambatan yang masih ditemukan adalah keterbatasan waktu dan kondisi lapangan yang terkadang menyulitkan penyampaian informasi secara menyeluruh. Misalnya, ketika terjadi peningkatan jumlah kendaraan pada kawasan wisata, fokus petugas lebih banyak diarahkan pada pengaturan lalu lintas dan ketertiban parkir sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

keberadaan petugas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses komunikasi kebijakan. Petugas dapat memberikan penjelasan secara langsung mengenai aturan parkir, lokasi yang diperbolehkan, serta alasan pentingnya mematuhi ketentuan yang berlaku. Pendekatan secara langsung dinilai lebih mudah diterima masyarakat karena pengguna kendaraan dapat memahami permasalahan yang terjadi di lapangan. Namun, hambatan yang dihadapi adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap aturan parkir. Sebagai contoh, masih ditemukan pengguna kendaraan yang memilih berhenti atau parkir di lokasi yang tidak sesuai karena alasan lebih dekat dengan tujuan, meskipun telah diberikan arahan oleh petugas. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan membutuhkan dukungan perubahan perilaku masyarakat secara bertahap.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Penggunaan berbagai media informasi menjadi faktor pendukung dalam memperluas penyampaian kebijakan pengelolaan parkir. Informasi melalui rambu parkir, papan petunjuk, serta media komunikasi lainnya membantu masyarakat mengetahui lokasi dan aturan parkir yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan pihak sekitar lokasi parkir, seperti pengelola kawasan wisata dan pelaku usaha, juga membantu memperkuat

penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan media informasi pada beberapa lokasi yang belum sepenuhnya mampu memberikan penjelasan secara optimal kepada pengguna kendaraan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya wisatawan yang baru datang ke Pangandaran, masih mengalami kesulitan dalam memahami aturan parkir yang berlaku.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Keterbukaan komunikasi antara petugas dan masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir. Masyarakat yang diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun masukan akan lebih mudah memahami tujuan kebijakan yang diterapkan. Hubungan komunikasi yang baik juga membantu menciptakan suasana pelayanan yang lebih humanis antara petugas dan pengguna parkir. Namun, hambatan yang masih terjadi adalah adanya perbedaan tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan parkir. Sebagian masyarakat dapat menerima dan mengikuti aturan dengan baik, tetapi sebagian lainnya masih menganggap aturan parkir sebagai bentuk pembatasan sehingga membutuhkan pendekatan dan edukasi yang lebih intensif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat komunikasi kebijakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyampaian informasi, aturan, dan tujuan kebijakan kepada pelaksana maupun masyarakat. Faktor pendukung komunikasi terlihat dari adanya koordinasi internal yang berjalan antara pimpinan dan petugas, adanya arahan serta pembinaan kepada pelaksana, dukungan dari pihak terkait, serta upaya pemanfaatan berbagai media informasi untuk membantu masyarakat memahami ketentuan parkir. Komunikasi secara langsung antara petugas dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman serta membangun kesadaran terhadap pentingnya

ketertiban parkir. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti belum meratanya penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat, keterbatasan media sosialisasi pada beberapa lokasi, tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan, serta masih adanya sebagian pengguna kendaraan yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi aturan parkir.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat komunikasi kebijakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran terlihat dari proses interaksi antara petugas pelaksana dengan masyarakat di lapangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petugas telah berupaya menyampaikan informasi dan memberikan arahan secara langsung kepada pengguna kendaraan, terutama pada lokasi parkir yang memiliki tingkat aktivitas tinggi seperti kawasan wisata. Selain itu, keberadaan rambu-rambu parkir dan tanda informasi pada beberapa lokasi turut membantu masyarakat dalam memahami aturan serta lokasi parkir yang telah ditentukan. Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh pengguna layanan parkir, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami aturan parkir atau memilih menggunakan lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat komunikasi kebijakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Adanya koordinasi antara pimpinan dan pelaksana, penyampaian arahan

secara rutin, dukungan pihak terkait, serta interaksi langsung petugas dengan masyarakat menjadi faktor pendukung yang membantu terciptanya pemahaman bersama mengenai aturan dan tujuan pengelolaan parkir. Namun, masih terdapat beberapa hambatan seperti belum optimalnya jangkauan sosialisasi, keterbatasan media penyampaian informasi, serta masih beragamnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan mematuhi aturan parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya membutuhkan penyampaian informasi secara administratif, tetapi juga memerlukan proses membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi melalui sosialisasi yang lebih aktif, penggunaan media informasi yang mudah diakses, serta pendekatan yang lebih persuasif menjadi hal penting agar implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Sumber Daya Pelaksana

Sumber daya pelaksana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir. Keberadaan sumber daya yang memadai menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Dalam pelaksanaan pengelolaan tempat parkir, sumber daya pelaksana tidak hanya berkaitan dengan jumlah aparatur atau petugas yang terlibat, tetapi juga mencakup kemampuan, kompetensi, pemahaman terhadap aturan, ketersediaan anggaran, serta dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional di

lapangan. Tanpa dukungan sumber daya yang baik, kebijakan yang telah dirumuskan akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai faktor pendukung, sumber daya pelaksana yang memiliki kompetensi, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap tugasnya akan membantu pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif. Petugas yang memahami aturan pengelolaan parkir, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan akan mendukung terciptanya sistem parkir yang tertib dan teratur. Selain itu, dukungan anggaran yang cukup serta tersedianya fasilitas pendukung seperti rambu parkir, marka parkir, lokasi parkir yang jelas, dan sarana pengawasan juga menjadi unsur penting yang dapat memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya pelaksana dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir. Jumlah petugas yang belum sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan pengawasan, keterbatasan kemampuan atau pelatihan bagi pelaksana, serta kurang optimalnya fasilitas pendukung dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan petugas, pemeliharaan fasilitas parkir, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Oleh karena itu, penguatan sumber daya pelaksana menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas,

penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta pengelolaan anggaran yang lebih optimal. Dengan sumber daya pelaksana yang berkualitas dan didukung oleh fasilitas yang memadai, kebijakan pengelolaan tempat parkir diharapkan mampu dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat.

Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat ketersediaan serta pemanfaatan sumber daya pelaksana, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir adalah adanya sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab dan pengalaman dalam menjalankan tugas pelayanan serta pengawasan di lapangan. Petugas yang memahami kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai situasi, terutama pada kawasan wisata yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan pada waktu tertentu. Selain itu, dukungan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan operasional juga menjadi faktor pendukung dalam memastikan kegiatan pengelolaan parkir tetap berjalan. Namun demikian, salah satu hambatan yang masih dihadapi adalah keterbatasan jumlah personel apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan tingginya aktivitas kendaraan, khususnya pada musim liburan. Kondisi tersebut menyebabkan diperlukan pengaturan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia agar pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Keberadaan petugas lapangan yang memiliki pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir. Petugas yang telah terbiasa menghadapi

kondisi lapangan mampu melakukan pengaturan kendaraan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mengambil tindakan ketika terjadi permasalahan parkir. Selain itu, adanya pembagian tugas membantu setiap petugas memahami wilayah dan tanggung jawab masing-masing. Namun, hambatan yang masih dirasakan adalah jumlah petugas yang belum selalu sebanding dengan kebutuhan di lapangan, terutama ketika terjadi lonjakan kendaraan pada lokasi wisata. Pada kondisi tersebut, petugas harus bekerja lebih maksimal agar seluruh area parkir tetap dapat terpantau dan tertata dengan baik.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam menunjang kegiatan pengelolaan tempat parkir. Anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional petugas, penyediaan perlengkapan kerja, serta kegiatan pengawasan di lapangan. Dengan adanya dukungan pembiayaan, pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara lebih terencana dan terarah. Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengembangan secara lebih luas, seperti peningkatan fasilitas parkir, pengadaan sarana teknologi pengawasan, maupun penambahan kebutuhan operasional lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan menentukan kebutuhan yang paling prioritas dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Ketersediaan sarana dan prasarana seperti rambu parkir, marka, perlengkapan petugas, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi faktor yang membantu pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir. Keberadaan fasilitas tersebut memudahkan masyarakat dalam mengetahui lokasi parkir dan membantu petugas melakukan pengaturan kendaraan. Namun, hambatan yang masih ditemukan adalah belum meratanya ketersediaan fasilitas pendukung pada seluruh lokasi parkir. Beberapa titik yang memiliki aktivitas tinggi masih membutuhkan peningkatan sarana agar mampu menyesuaikan dengan jumlah kendaraan yang datang. Misalnya, pada saat terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, kebutuhan terhadap petunjuk arah parkir dan pengaturan ruang parkir menjadi lebih besar agar tidak terjadi kepadatan kendaraan.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Pemanfaatan sumber daya yang ada telah dilakukan secara maksimal melalui kerja sama dan koordinasi antarpetugas. Keterbatasan sumber daya yang tersedia tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan, karena petugas berusaha menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan kondisi yang ada di lapangan. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah pengaturan prioritas lokasi pengawasan berdasarkan tingkat kepadatan dan kebutuhan masyarakat. Namun, hambatan yang masih dihadapi adalah kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi perkembangan pengelolaan parkir yang semakin kompleks. Selain kemampuan teknis, petugas juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat memberikan pelayanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat ketersediaan serta pemanfaatan sumber daya pelaksana memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Faktor pendukung terlihat dari adanya ketersediaan petugas yang memiliki pengalaman, pemahaman terhadap tugas, serta tanggung jawab dalam melaksanakan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan parkir di lapangan. Selain itu, dukungan anggaran operasional dan keberadaan sarana prasarana seperti rambu parkir, perlengkapan petugas, serta fasilitas pendukung lainnya turut membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan dan tingginya aktivitas kendaraan, keterbatasan anggaran untuk pengembangan fasilitas, serta belum meratanya ketersediaan sarana pendukung pada beberapa

lokasi parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi masih membutuhkan penguatan dan optimalisasi agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan parkir, terutama pada kawasan dengan tingkat kunjungan masyarakat dan wisatawan yang tinggi.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat sumber daya pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran terlihat dari kondisi nyata pelaksanaan tugas di lapangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa keberadaan petugas Dinas Perhubungan telah membantu dalam melakukan pengaturan kendaraan, memberikan pelayanan kepada pengguna parkir, serta menjaga ketertiban pada beberapa lokasi yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi. Petugas terlihat berupaya menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya meskipun menghadapi kondisi lapangan yang dinamis, terutama pada kawasan wisata yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan pada waktu tertentu. Selain itu, telah tersedia beberapa sarana pendukung seperti rambu-rambu parkir, perlengkapan petugas, dan fasilitas informasi yang membantu proses pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan masih adanya beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas pada saat terjadi lonjakan kendaraan, belum optimalnya ketersediaan fasilitas pendukung pada beberapa titik parkir, serta kebutuhan peningkatan sarana pengawasan agar mampu menjangkau seluruh wilayah pelayanan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat sumber daya pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki pengalaman, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap tugas, serta adanya anggaran operasional dan sarana prasarana pendukung telah membantu petugas dalam menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, dan pengawasan parkir. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan jumlah personel, kebutuhan peningkatan kompetensi pelaksana, keterbatasan anggaran untuk pengembangan fasilitas, serta belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung pada seluruh lokasi parkir. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan dan optimalisasi sumber daya secara berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan pelayanan parkir yang tertib, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Sikap dan Komitmen Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana merupakan faktor yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir. Kebijakan yang telah disusun dengan baik tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh kesungguhan dan tanggung jawab dari pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam pengelolaan tempat parkir, sikap pelaksana mencerminkan bagaimana aparatur Dinas Perhubungan dan

petugas parkir memahami tugasnya, mematuhi aturan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memiliki kepedulian terhadap tercapainya tujuan kebijakan. Komitmen pelaksana menjadi bentuk keseriusan dalam menjalankan kebijakan agar dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagai faktor pendukung, sikap dan komitmen pelaksana yang baik akan mendorong terciptanya pengelolaan tempat parkir yang tertib, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pelaksana yang memiliki integritas, disiplin, serta rasa tanggung jawab akan lebih mampu menjalankan tugas seperti melakukan penataan parkir, memberikan arahan kepada pengguna parkir, melakukan pengawasan, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, adanya pemahaman yang sama terhadap tujuan kebijakan akan memperkuat kerja sama antarpetugas sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih konsisten.

Namun demikian, sikap dan komitmen pelaksana juga dapat menjadi faktor penghambat apabila terdapat kurangnya kedisiplinan, rendahnya kepatuhan terhadap prosedur, atau belum optimalnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Perbedaan pemahaman terhadap aturan, kurangnya motivasi kerja, serta lemahnya pengawasan terhadap kinerja petugas dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas pelayanan parkir, ketertiban lokasi parkir, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola fasilitas publik.

Oleh karena itu, peningkatan sikap dan komitmen pelaksana menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan secara berkelanjutan, peningkatan disiplin kerja, pemberian arahan yang jelas, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya pelaksana yang memiliki sikap profesional dan komitmen yang tinggi, kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat terlaksana secara lebih efektif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat sikap, komitmen, kedisiplinan, serta tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Pangandaran, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Faktor yang mendukung sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan tempat parkir adalah adanya pemahaman bahwa tugas tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Petugas tidak hanya dituntut untuk mengatur kendaraan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna layanan parkir. Komitmen tersebut dibangun melalui pengarahan, pembinaan, serta evaluasi secara berkala agar setiap pelaksana memahami peran dan kewajibannya. Namun demikian, salah satu hambatan yang masih dihadapi adalah menjaga konsistensi kedisiplinan seluruh pelaksana, terutama ketika menghadapi kondisi lapangan yang tidak selalu sama. Tingginya aktivitas kendaraan pada kawasan wisata dan karakteristik masyarakat yang beragam membutuhkan kesabaran, kemampuan komunikasi, serta komitmen yang kuat agar pelaksanaan tugas tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Pengalaman kerja dan pemahaman terhadap kondisi lapangan menjadi faktor yang mendukung terbentuknya sikap profesional pelaksana. Petugas yang telah memahami karakteristik wilayah Pangandaran mampu menyesuaikan cara kerja dengan situasi yang dihadapi, terutama ketika terjadi peningkatan jumlah kendaraan pada waktu tertentu. Sikap saling membantu antarpetugas juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan tugas. Namun, hambatan yang masih ditemukan adalah adanya tantangan dalam mempertahankan kedisiplinan ketika menghadapi tekanan pekerjaan yang cukup tinggi. Pada saat jumlah kendaraan meningkat, petugas harus mampu tetap menjaga sikap pelayanan, mengendalikan situasi, dan menjalankan aturan tanpa mengabaikan hubungan yang baik dengan masyarakat.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan menjadi faktor pendukung utama dalam menjalankan kebijakan pengelolaan tempat parkir. Petugas menyadari bahwa keberadaan mereka di lapangan memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Bentuk tanggung jawab tersebut terlihat dari kesediaan petugas untuk melakukan pengaturan kendaraan, memberikan arahan kepada pengguna parkir, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lokasi parkir. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran antarpetugas dalam menjalankan standar pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui pembinaan dan evaluasi agar seluruh pelaksana memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur kerja menjadi faktor pendukung dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir. Petugas berupaya menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan, seperti melakukan pengaturan kendaraan pada lokasi yang telah ditentukan, memberikan pelayanan secara tertib, serta melakukan koordinasi apabila menemukan kendala di lapangan. Sikap patuh terhadap aturan tersebut membantu menciptakan pelaksanaan kebijakan yang lebih terarah. Namun, hambatan yang masih muncul adalah adanya situasi

tertentu yang membutuhkan penyesuaian di lapangan, seperti kondisi jalan yang padat atau adanya masyarakat yang belum memahami aturan parkir. Dalam kondisi tersebut, petugas harus mampu mengambil langkah yang tepat dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

hubungan yang baik antara petugas dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sikap yang ramah, terbuka, dan mampu memberikan penjelasan secara baik membantu masyarakat menerima aturan parkir yang diterapkan. Petugas menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan parkir tidak hanya ditentukan oleh tindakan penertiban, tetapi juga melalui pendekatan yang mampu membangun kesadaran masyarakat. Namun, hambatan yang masih dihadapi adalah masih adanya sebagian masyarakat yang kurang memahami pentingnya mematuhi aturan parkir sehingga terkadang menimbulkan perbedaan pemahaman antara petugas dan pengguna kendaraan. Kondisi tersebut membutuhkan kesabaran dan konsistensi petugas dalam memberikan edukasi agar masyarakat secara perlahan dapat menerima dan mendukung kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat sikap, komitmen, kedisiplinan, serta tanggung jawab pelaksana memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Faktor pendukung terlihat dari adanya pemahaman pelaksana terhadap tugas dan tanggung jawabnya, kesadaran bahwa pengelolaan parkir merupakan bagian dari pelayanan publik, adanya arahan dan pembinaan dari

pimpinan, serta pengalaman petugas dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Sikap profesional, kedisiplinan, dan komitmen petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga ketertiban parkir. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti perbedaan tingkat kedisiplinan antarpetugas, kondisi lapangan yang dinamis terutama pada saat peningkatan jumlah kendaraan, serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi aturan parkir yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana telah mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi perlu terus diperkuat melalui pembinaan, evaluasi kinerja, dan peningkatan kapasitas pelaksana agar mampu menjalankan tugas secara konsisten, profesional, dan bertanggung jawab.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat sikap, komitmen, kedisiplinan, serta tanggung jawab pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran terlihat dari aktivitas petugas dalam menjalankan tugas di lapangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petugas telah berupaya melaksanakan tanggung jawabnya melalui kegiatan pengaturan kendaraan, memberikan arahan kepada masyarakat, serta menjaga ketertiban pada lokasi parkir yang menjadi kewenangannya. Sikap pelayanan yang ditunjukkan petugas, seperti memberikan informasi secara langsung dan membantu pengguna kendaraan memahami aturan parkir, menjadi salah satu bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kedisiplinan petugas terlihat dari

kehadiran dan keterlibatan mereka dalam melakukan pengawasan, terutama pada lokasi yang memiliki aktivitas kendaraan tinggi seperti kawasan wisata.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat sikap, komitmen, kedisiplinan, serta tanggung jawab pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa aspek perilaku pelaksana memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan kebijakan. Sikap profesional, kesadaran terhadap tugas, kepatuhan terhadap aturan, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi faktor pendukung yang membantu pelaksanaan pengelolaan parkir berjalan lebih tertib dan terarah. Pelaksana telah menunjukkan upaya dalam menjalankan tugas melalui pengaturan kendaraan, pemberian arahan kepada masyarakat, serta menjaga ketertiban pada lokasi parkir sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan seperti perlunya menjaga konsistensi kedisiplinan seluruh pelaksana, menghadapi kondisi lapangan yang berubah-ubah, serta meningkatkan kemampuan dalam menangani berbagai karakteristik masyarakat pengguna parkir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen melalui pembinaan, evaluasi kinerja, dan peningkatan kapasitas pelaksana secara berkelanjutan agar setiap petugas mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan sikap dan komitmen pelaksana yang semakin baik, implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran akan semakin efektif dalam mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat

Pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir. Pengawasan berperan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan, tujuan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya pengelolaan parkir yang tertib dan efektif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan kerja sama antara Dinas Perhubungan sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan agar kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat berjalan secara optimal.

Sebagai faktor pendukung, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dapat membantu mengidentifikasi berbagai permasalahan di lapangan, seperti ketidakteraturan lokasi parkir, pelanggaran aturan parkir, maupun kendala pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan yang baik juga dapat meningkatkan kedisiplinan petugas parkir serta memastikan bahwa pengelolaan parkir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, partisipasi masyarakat melalui kepatuhan terhadap aturan parkir, penggunaan fasilitas parkir yang telah disediakan, serta pemberian masukan atau laporan terkait permasalahan parkir menjadi dukungan penting dalam menciptakan sistem parkir yang lebih tertib.

Namun, pengawasan dan partisipasi masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat apabila pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Keterbatasan jumlah petugas pengawas, luasnya wilayah yang harus dipantau, serta belum optimalnya mekanisme pengendalian dapat menyebabkan beberapa permasalahan parkir sulit ditangani secara cepat. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir, kebiasaan memarkir kendaraan di lokasi yang tidak diperbolehkan, serta kurangnya kepedulian terhadap ketertiban umum dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan tempat parkir.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari strategi untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas pengawasan, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib parkir. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan keterlibatan masyarakat yang tinggi, pengelolaan tempat parkir dapat berjalan lebih baik, menciptakan ketertiban lalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran.

Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan tempat parkir yang tertib, aman, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan tempat parkir dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan, evaluasi terhadap kondisi parkir, serta koordinasi dengan petugas yang bertanggung jawab pada masing-masing wilayah. Keberadaan petugas lapangan yang memahami kondisi lokasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses pengawasan karena mereka dapat memberikan informasi secara cepat apabila terjadi permasalahan. Selain itu, dukungan masyarakat yang bersedia mengikuti aturan parkir juga sangat membantu menciptakan kondisi yang tertib. Namun demikian, hambatan yang masih dihadapi adalah luasnya wilayah Kabupaten Pangandaran dan tingginya aktivitas kendaraan, terutama pada kawasan wisata, sehingga pengawasan secara menyeluruh membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih optimal. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya mematuhi aturan parkir sehingga diperlukan pendekatan yang lebih edukatif dan berkelanjutan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Faktor yang mendukung kegiatan pengawasan adalah adanya pembagian wilayah kerja dan koordinasi antarpetugas dalam melakukan pemantauan kondisi parkir di lapangan. Petugas yang berada langsung di lokasi dapat lebih mudah mengetahui permasalahan yang terjadi, seperti kendaraan yang parkir tidak sesuai tempat atau adanya kepadatan kendaraan pada waktu tertentu. Selain itu, komunikasi antara petugas dan masyarakat juga membantu dalam menciptakan suasana pengelolaan parkir yang lebih tertib. Namun, hambatan yang masih ditemukan adalah keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan. Pada saat terjadi peningkatan jumlah kendaraan, terutama ketika banyak wisatawan berkunjung, petugas harus melakukan pengaturan dengan kondisi sumber daya yang terbatas sehingga pengawasan belum selalu dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh titik parkir.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan pengelolaan tempat parkir. Masyarakat yang memiliki

kesadaran untuk memarkirkan kendaraan pada lokasi yang telah ditentukan dan mengikuti arahan petugas akan membantu menciptakan kondisi parkir yang aman dan tertib. Bentuk partisipasi masyarakat juga terlihat dari kesediaan memberikan informasi atau menyampaikan keluhan apabila terdapat permasalahan terkait pengelolaan parkir. Namun demikian, hambatan yang masih dihadapi adalah belum semua masyarakat memiliki kesadaran yang sama terhadap aturan parkir. Sebagian pengguna kendaraan masih cenderung memilih lokasi parkir berdasarkan kemudahan dan kedekatan dengan tujuan tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan petugas masih perlu melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman secara langsung agar masyarakat lebih memahami pentingnya keteraturan parkir.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Keberadaan pengawasan rutin menjadi faktor pendukung dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir. Pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan agar masyarakat dan pelaksana sama-sama memahami aturan yang berlaku. Selain itu, adanya kerja sama dengan pihak lain di sekitar lokasi parkir, seperti pengelola kawasan wisata dan masyarakat setempat, turut membantu menciptakan lingkungan parkir yang lebih tertib. Namun, hambatan yang masih ditemukan adalah adanya perubahan kondisi lapangan yang cukup cepat, terutama pada kawasan wisata yang mengalami peningkatan kendaraan secara tiba-tiba. Situasi tersebut membutuhkan respons yang cepat dari petugas agar pengawasan tetap berjalan efektif dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Keberhasilan pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui tindakan penertiban, tetapi juga melalui pemberian pemahaman mengenai manfaat adanya pengaturan parkir bagi kenyamanan bersama. Ketika masyarakat memahami bahwa kebijakan parkir bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, maka kepatuhan terhadap aturan akan lebih mudah terbentuk. Namun, hambatan yang masih dihadapi adalah masih adanya masyarakat yang menganggap aturan parkir sebagai bentuk pembatasan, bukan sebagai upaya pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat agar

mereka merasa menjadi bagian dari upaya menciptakan pengelolaan parkir yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan serta partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Faktor pendukung terlihat dari adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas melalui pemantauan langsung di lapangan, koordinasi antarpetugas, serta kerja sama dengan pihak terkait dalam menjaga ketertiban parkir. Selain itu, keterlibatan masyarakat yang bersedia mematuhi aturan parkir, menggunakan lokasi parkir sesuai ketentuan, serta memberikan masukan terhadap permasalahan yang terjadi menjadi bentuk partisipasi yang membantu keberhasilan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan jumlah petugas dalam melakukan pengawasan pada seluruh wilayah, tingginya aktivitas kendaraan terutama pada kawasan wisata, perubahan kondisi lalu lintas yang cepat, serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya mematuhi aturan parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan partisipasi masyarakat telah mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir, tetapi masih memerlukan penguatan melalui peningkatan intensitas pengawasan, perluasan sosialisasi, serta pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan serta partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Pangandaran terlihat dari aktivitas pengendalian dan interaksi antara petugas dengan masyarakat di lapangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petugas telah melakukan pengawasan melalui pemantauan kondisi parkir, pengaturan kendaraan, serta pemberian arahan kepada pengguna kendaraan agar mematuhi lokasi parkir yang telah ditentukan. Pada beberapa lokasi dengan tingkat aktivitas tinggi, terutama kawasan wisata, keberadaan petugas membantu menciptakan kondisi parkir yang lebih tertib dan mengurangi potensi gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Selain itu, terlihat adanya masyarakat yang telah menunjukkan partisipasi dengan mengikuti arahan petugas, menggunakan area parkir yang tersedia, serta menjaga ketertiban selama menggunakan fasilitas parkir.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran merupakan faktor penting yang mendukung terciptanya pengelolaan parkir yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya kegiatan pemantauan oleh petugas, koordinasi dengan pihak terkait, serta keterlibatan masyarakat dalam mematuhi aturan parkir menjadi unsur pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan pengawasan akibat luasnya wilayah pelayanan, peningkatan jumlah kendaraan pada waktu tertentu, serta belum meratanya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan secara berkelanjutan, peningkatan komunikasi dengan masyarakat, serta upaya

membangun kesadaran bersama bahwa ketertiban parkir bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Faktor pendukung terlihat dari adanya komitmen Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kebijakan, dukungan sumber daya pelaksana yang memiliki pengalaman dan tanggung jawab, adanya koordinasi dalam pelaksanaan tugas, serta mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan parkir. Selain itu, keberadaan regulasi, pembagian tugas, dan kegiatan pengawasan turut membantu pelaksanaan kebijakan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, penyampaian informasi kebijakan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, serta masih adanya sebagian pengguna kendaraan yang belum memiliki kesadaran dalam mematuhi aturan parkir.

4.1.2.3 Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

Dalam upaya meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran perlu melakukan berbagai

langkah perbaikan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan secara jelas kepada masyarakat dan pelaksana, meningkatkan kapasitas aparatur serta petugas parkir melalui pembinaan dan pelatihan, menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, serta memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya pengelolaan parkir yang tertib, karena masyarakat bukan hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai pihak yang turut berperan dalam menjaga ketertiban bersama. Dengan adanya komunikasi yang efektif, sumber daya yang berkualitas, pengawasan yang konsisten, serta keterlibatan masyarakat, implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk mengetahui Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dilakukan analisis beberapa aspek yang antara lain :

1. Kualitas Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan

Kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, komunikasi memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari kebijakan tersebut.

Melalui komunikasi yang baik, tujuan, aturan, serta mekanisme pengelolaan tempat parkir dapat dipahami secara lebih jelas oleh seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran perlu memastikan bahwa setiap informasi mengenai kebijakan parkir dapat disampaikan secara tepat, mudah dipahami, dan diterima oleh masyarakat maupun petugas pelaksana.

Peningkatan kualitas komunikasi dapat dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, baik kepada petugas parkir, pelaku usaha di sekitar lokasi parkir, maupun masyarakat pengguna kendaraan. Sosialisasi tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan aturan mengenai tata cara parkir, lokasi parkir yang diperbolehkan, serta kewajiban pengguna parkir, tetapi juga untuk memberikan pemahaman bahwa pengelolaan parkir merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban lalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pendekatan komunikasi yang lebih humanis, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan karena memahami manfaat dan tujuan dari aturan tersebut.

Selain melalui komunikasi langsung, pemanfaatan berbagai media informasi juga menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan penyampaian kebijakan. Penggunaan media sosial, papan informasi, rambu-rambu parkir, serta media komunikasi lainnya dapat membantu masyarakat memperoleh informasi secara lebih cepat dan mudah. Di sisi lain, koordinasi internal antara pimpinan, aparatur, dan petugas pelaksana juga perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam menjalankan kebijakan di lapangan. Kesamaan

pemahaman antar pelaksana akan menciptakan pelayanan yang lebih konsisten dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Namun, peningkatan komunikasi dan sosialisasi juga perlu memperhatikan berbagai kendala yang mungkin muncul, seperti keterbatasan media penyampaian informasi, belum meratanya pemahaman masyarakat, serta kurangnya intensitas sosialisasi pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pola komunikasi yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir.

Dengan demikian, kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan menjadi strategi yang sangat penting dalam memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Melalui penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, diharapkan dapat terbentuk kesamaan persepsi antara pemerintah, petugas pelaksana, dan masyarakat sehingga kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat berjalan lebih efektif, tertib, serta mampu memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan tempat parkir agar informasi mengenai aturan, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan dapat dipahami serta diterapkan oleh pelaksana dan masyarakat, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan pengelolaan tempat parkir adalah dengan memperkuat koordinasi internal serta meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Penyampaian kebijakan kepada petugas dilakukan melalui pengarahan dan pembinaan agar seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan, tugas, dan tanggung jawabnya. Sementara itu, kepada masyarakat, penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai pendekatan yang mudah dipahami, seperti memberikan edukasi langsung di lokasi parkir dan menyampaikan pentingnya ketertiban parkir bagi kenyamanan bersama. Upaya tersebut dilakukan karena pengelolaan parkir tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat sebagai pengguna layanan. Meskipun demikian, komunikasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan karena karakteristik masyarakat dan wisatawan di Kabupaten Pangandaran sangat beragam, sehingga pemahaman terhadap aturan parkir perlu terus dibangun melalui proses sosialisasi yang konsisten.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan komunikasi kebijakan adalah dengan memberikan arahan secara rutin kepada petugas sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Melalui pengarahan tersebut, petugas memperoleh pemahaman mengenai lokasi yang menjadi tanggung jawabnya, aturan yang harus diterapkan, serta cara berkomunikasi dengan masyarakat ketika menghadapi permasalahan parkir. Selain itu, petugas juga diberikan pemahaman agar tidak hanya melakukan penertiban, tetapi mampu memberikan pelayanan dengan pendekatan yang ramah dan persuasif. Hal ini dilakukan karena masyarakat akan lebih mudah menerima aturan apabila disampaikan dengan cara yang baik. Namun, komunikasi kepada masyarakat tetap membutuhkan penguatan karena masih terdapat pengguna kendaraan yang belum mengetahui secara jelas mengenai aturan parkir, terutama wisatawan yang baru berkunjung ke Kabupaten Pangandaran.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi komunikasi yang dilakukan adalah memanfaatkan interaksi langsung antara petugas dengan masyarakat sebagai sarana penyampaian

informasi kebijakan. Petugas di lapangan tidak hanya bertugas mengatur kendaraan, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai lokasi parkir yang diperbolehkan, tata cara parkir, serta alasan pentingnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pendekatan langsung tersebut dinilai lebih efektif karena masyarakat dapat memahami kebijakan melalui pengalaman nyata ketika menggunakan fasilitas parkir. Selain itu, penyampaian informasi juga dilakukan melalui pemasangan rambu atau tanda petunjuk pada lokasi tertentu agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mandiri. Namun demikian, masih diperlukan penambahan media informasi pada beberapa lokasi agar penyampaian kebijakan dapat menjangkau lebih banyak pengguna kendaraan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi lain yang dilakukan adalah memperluas kerja sama dengan pihak-pihak yang berada di sekitar lokasi parkir, seperti pengelola kawasan wisata, pelaku usaha, dan masyarakat setempat. Kerja sama tersebut dilakukan karena penyampaian informasi mengenai kebijakan parkir akan lebih efektif apabila melibatkan pihak yang berinteraksi langsung dengan pengguna kendaraan. Melalui kerja sama tersebut, informasi mengenai aturan parkir dapat disampaikan secara lebih luas dan tidak hanya bergantung pada petugas Dinas Perhubungan. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait juga membantu dalam memberikan pemahaman bahwa pengelolaan parkir merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Kabupaten Pangandaran. Kendala yang masih dihadapi adalah perlunya kesinambungan koordinasi agar pesan kebijakan yang disampaikan oleh berbagai pihak tetap memiliki arah dan pemahaman yang sama.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi peningkatan komunikasi kebijakan juga dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan respon masyarakat di lapangan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana informasi mengenai kebijakan parkir telah dipahami dan bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan. Apabila ditemukan masyarakat yang belum memahami aturan, maka petugas akan memberikan penjelasan secara langsung dengan pendekatan yang lebih mudah diterima. Selain itu, masukan dari masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki proses komunikasi kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan pengelolaan parkir diharapkan

tidak hanya dipandang sebagai aturan yang harus ditaati, tetapi sebagai upaya bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan tempat parkir dilakukan melalui berbagai upaya yang bertujuan agar aturan, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat. Strategi tersebut meliputi peningkatan koordinasi internal, pemberian arahan dan pembinaan kepada petugas, penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat melalui petugas di lapangan, pemasangan media informasi pada lokasi parkir, serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait seperti pengelola kawasan dan masyarakat sekitar. Upaya komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat penyampaian aturan, tetapi juga diarahkan untuk membangun pemahaman dan kesadaran bahwa ketertiban parkir merupakan bagian dari pelayanan publik yang membutuhkan dukungan bersama. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi komunikasi masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keberagaman karakteristik masyarakat dan wisatawan, luasnya wilayah pelayanan, serta masih adanya sebagian pengguna kendaraan yang belum sepenuhnya memahami aturan parkir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi secara berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih komunikatif, mudah dipahami, dan melibatkan berbagai pihak agar kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat diterapkan secara lebih efektif di Kabupaten Pangandaran.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa strategi peningkatan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh

Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah dilakukan melalui penyampaian informasi secara langsung oleh petugas kepada masyarakat, pemberian arahan di lokasi parkir, serta pemanfaatan sarana informasi seperti rambu dan tanda petunjuk parkir. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petugas telah berupaya membangun komunikasi yang baik dengan pengguna kendaraan melalui pendekatan yang persuasif agar masyarakat memahami aturan, tujuan, dan mekanisme pengelolaan parkir yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti belum meratanya informasi yang diterima oleh seluruh masyarakat, terutama pada saat terjadi peningkatan aktivitas kendaraan di kawasan wisata, serta masih adanya pengguna kendaraan yang belum sepenuhnya mematuhi aturan parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan sosialisasi telah berjalan sebagai upaya mendukung implementasi kebijakan, tetapi masih membutuhkan penguatan secara berkelanjutan agar informasi kebijakan dapat dipahami secara lebih luas dan diterapkan dengan baik oleh seluruh masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa strategi peningkatan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah menjadi upaya penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Melalui koordinasi internal, pembinaan kepada pelaksana, penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat, serta pemanfaatan media informasi, Dinas Perhubungan telah berupaya membangun pemahaman bersama mengenai aturan, tujuan, dan mekanisme pengelolaan parkir. Meskipun demikian, masih diperlukan

peningkatan intensitas sosialisasi dan pengembangan metode komunikasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat mengingat karakteristik wilayah Pangandaran sebagai daerah wisata dengan mobilitas kendaraan yang tinggi. Oleh karena itu, penguatan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturan parkir, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mendukung terciptanya pengelolaan tempat parkir yang tertib, aman, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Kapasitas Sumber Daya Pelaksana

Kapasitas sumber daya pelaksana menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir, karena keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pihak yang menjalankan kebijakan tersebut. Sumber daya pelaksana tidak hanya dilihat dari jumlah personel yang tersedia, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, pemahaman terhadap aturan, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, aparatur dan petugas parkir memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah menjadi pelayanan nyata di lapangan.

Peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Petugas yang terlibat dalam pengelolaan parkir perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi perparkiran, prosedur pelayanan, teknik pengawasan, serta cara

berkomunikasi dengan masyarakat. Hal tersebut penting agar pelaksana tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga mampu menghadapi berbagai kondisi di lapangan dengan sikap profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya pelaksana yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang baik, berbagai permasalahan parkir dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat.

Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dukungan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi bagian dari penguatan kapasitas pelaksana. Petugas parkir akan lebih mudah menjalankan tugas apabila didukung dengan fasilitas yang memadai, seperti rambu dan marka parkir yang jelas, perlengkapan kerja, sistem pendataan, serta fasilitas pengawasan yang mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dukungan anggaran yang memadai juga diperlukan agar kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemeliharaan fasilitas parkir dapat dilakukan secara optimal.

Namun, dalam meningkatkan kapasitas sumber daya pelaksana masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan luas wilayah pengelolaan parkir, kebutuhan peningkatan keterampilan, serta belum meratanya dukungan fasilitas pada setiap lokasi parkir. Oleh karena itu, diperlukan manajemen sumber daya yang lebih baik melalui perencanaan kebutuhan personel, peningkatan kualitas pelatihan, serta evaluasi kinerja secara berkala agar pelaksana mampu menjalankan tugas sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana merupakan langkah strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran. Melalui aparaturnya dan petugas parkir yang kompeten, didukung fasilitas yang memadai serta pengelolaan sumber daya yang efektif, kebijakan pengelolaan parkir diharapkan dapat terlaksana secara lebih optimal, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan kondisi parkir yang tertib, aman, serta nyaman bagi masyarakat.

Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kapasitas sumber daya pelaksana, baik melalui peningkatan kompetensi aparaturnya, penyediaan sarana prasarana, maupun dukungan anggaran agar implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat berjalan lebih efektif, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi utama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya pelaksana dilakukan melalui pembinaan, pengarahan, dan peningkatan pemahaman aparaturnya terhadap tugas serta tanggung jawab dalam pengelolaan tempat parkir. Petugas tidak hanya dituntut mampu melakukan pengaturan kendaraan, tetapi juga harus memiliki kemampuan memberikan pelayanan, berkomunikasi dengan masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan. Selain peningkatan kompetensi aparaturnya, Dinas Perhubungan juga berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan operasional serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. Namun demikian, pengembangan sumber daya masih menjadi perhatian karena luasnya wilayah Kabupaten Pangandaran dan meningkatnya aktivitas kendaraan membutuhkan kesiapan personel serta fasilitas yang semakin baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan kebutuhan prioritas di lapangan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Peningkatan kemampuan petugas menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir. Peningkatan tersebut dilakukan melalui pemberian arahan kerja, evaluasi pelaksanaan tugas, serta pembelajaran dari pengalaman di lapangan. Petugas diberikan pemahaman mengenai bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, menerapkan aturan parkir, dan mengambil keputusan ketika menghadapi kondisi tertentu. Strategi tersebut membantu petugas lebih percaya diri dalam menjalankan tugas karena mereka tidak hanya memahami prosedur kerja, tetapi juga memahami tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan secara lebih terstruktur agar kemampuan petugas dapat terus berkembang sesuai dengan tantangan pengelolaan parkir yang semakin kompleks.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir. Ketersediaan perlengkapan kerja, rambu parkir, tanda informasi, serta fasilitas pendukung lainnya membantu petugas dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan di lapangan. Dengan adanya sarana yang memadai, masyarakat juga lebih mudah memahami lokasi dan aturan parkir yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kebutuhan fasilitas yang perlu ditingkatkan, terutama pada lokasi dengan tingkat aktivitas kendaraan yang tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar sarana pendukung dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan mendukung terciptanya pengelolaan parkir yang lebih tertib.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Dukungan anggaran menjadi salah satu unsur penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya pelaksana. Anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan operasional petugas, pemeliharaan fasilitas, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan parkir. Dengan adanya dukungan pembiayaan, pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara lebih terencana dan tidak hanya bergantung pada kondisi yang ada di lapangan. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengembangan secara maksimal, seperti

penambahan fasilitas berbasis teknologi atau peningkatan jumlah sarana pendukung pada seluruh lokasi parkir. Oleh karena itu, pemanfaatan anggaran dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan parkir.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi peningkatan kapasitas sumber daya juga dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antarpetugas. Koordinasi yang baik membantu setiap pelaksana memahami perannya masing-masing sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah. Selain itu, petugas saling memberikan dukungan ketika menghadapi kondisi lapangan yang membutuhkan penanganan cepat, seperti peningkatan jumlah kendaraan pada musim liburan. Upaya tersebut menjadi bentuk adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan agar seluruh petugas memiliki kemampuan yang merata, baik dalam aspek teknis pengelolaan parkir maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kapasitas sumber daya pelaksana telah diarahkan pada upaya memperkuat kemampuan aparatur, menyediakan dukungan sarana dan prasarana, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pembinaan, pengarahan, evaluasi, dan pemberian pemahaman kepada petugas agar mampu menjalankan tugas secara profesional, baik dalam pengaturan kendaraan, pelayanan masyarakat, maupun penyelesaian permasalahan di lapangan. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung dan dukungan pembiayaan menjadi bagian penting dalam memastikan petugas dapat melaksanakan tugas secara efektif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti

keterbatasan jumlah personel, kebutuhan peningkatan fasilitas pada beberapa lokasi, serta keterbatasan anggaran dalam pengembangan sarana pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana telah menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, namun masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mendukung implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir yang lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa strategi peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran terlihat dari upaya petugas dalam menjalankan tugas pengelolaan tempat parkir melalui pengaturan kendaraan, pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan pengawasan di lapangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petugas telah memiliki pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta memanfaatkan sarana pendukung yang tersedia dalam membantu pelaksanaan kebijakan. Selain itu, koordinasi antarpetugas terlihat berjalan dalam menghadapi kondisi tertentu, terutama pada lokasi dengan tingkat aktivitas kendaraan yang tinggi. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah petugas, belum optimalnya ketersediaan fasilitas pendukung pada beberapa titik parkir, serta perlunya peningkatan sarana dan dukungan operasional agar pelayanan dapat berjalan lebih maksimal.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa strategi peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi kerja, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pemanfaatan anggaran secara optimal sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan jumlah petugas, kebutuhan peningkatan fasilitas, dan keterbatasan dukungan operasional, namun langkah-langkah yang dilakukan telah membantu meningkatkan kesiapan pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar petugas mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan efektif sehingga pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Sistem pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir, karena melalui pengawasan pemerintah dapat memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan, aturan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menemukan kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan perbaikan agar pengelolaan tempat parkir dapat berjalan lebih efektif. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan menjadi bagian dari fungsi manajemen yang membantu Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam menjaga

kualitas pelayanan publik serta menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan parkir.

Peningkatan sistem pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan parkir di berbagai lokasi, baik terhadap petugas parkir, pengguna fasilitas parkir, maupun kondisi sarana pendukung yang tersedia. Kegiatan monitoring tersebut diperlukan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti ketidakteraturan lokasi parkir, pelanggaran penggunaan ruang parkir, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, serta kendala yang dihadapi oleh petugas dalam memberikan pelayanan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara konsisten, setiap permasalahan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sehingga tidak berkembang menjadi hambatan yang lebih besar.

Selain pengawasan langsung, sistem pengendalian juga perlu diperkuat melalui penyusunan mekanisme kerja yang jelas, evaluasi secara berkala, serta koordinasi antar pihak yang berkepentingan. Dinas Perhubungan perlu memiliki sistem pelaporan dan evaluasi yang mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan, baik dalam aspek pelayanan, kinerja petugas, maupun penataan lokasi parkir. Dengan demikian, pengendalian tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk mencegah munculnya permasalahan di masa mendatang.

Namun, dalam pelaksanaannya sistem pengawasan dan pengendalian juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah petugas pengawas,

luasnya wilayah yang harus dipantau, serta masih adanya perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi aturan parkir. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengawasan, seperti pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi dengan aparat terkait, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kebijakan parkir.

Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian menjadi strategi yang sangat penting dalam meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Melalui pengawasan yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada perbaikan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan parkir berjalan sesuai dengan harapan serta mampu menciptakan pelayanan yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir agar tercipta ketertiban, kepatuhan, dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pimpinan, petugas lapangan, serta pihak terkait yang memiliki peran dalam pengelolaan parkir. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi pelaksanaan kebijakan, baik dari sisi kepatuhan petugas maupun keteraturan masyarakat dalam menggunakan fasilitas parkir. Selain melakukan pemantauan, Dinas Perhubungan juga melakukan evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang muncul di lapangan sebagai bahan

perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah luasnya wilayah Kabupaten Pangandaran dan tingginya aktivitas kendaraan pada waktu tertentu, terutama saat musim liburan, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan agar seluruh lokasi parkir dapat terpantau dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan terus dikembangkan melalui koordinasi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Salah satu strategi penguatan pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung oleh petugas di lokasi parkir. Kehadiran petugas di lapangan menjadi hal penting karena dapat mengetahui secara langsung kondisi parkir, memberikan arahan kepada pengguna kendaraan, serta melakukan tindakan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. Pengawasan secara langsung juga membantu membangun komunikasi antara petugas dan masyarakat sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Namun, kendala yang masih ditemui adalah keterbatasan jumlah petugas apabila dibandingkan dengan luas area yang harus diawasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan perlu dilakukan dengan menentukan skala prioritas pada lokasi yang memiliki tingkat aktivitas kendaraan lebih tinggi.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi pengendalian dilakukan melalui evaluasi dan koordinasi secara rutin untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tetap berjalan sesuai ketentuan. Setiap permasalahan yang ditemukan di lapangan menjadi bahan pembahasan untuk mencari solusi yang tepat, baik terkait perilaku pengguna kendaraan, kondisi fasilitas parkir, maupun kendala yang dialami petugas. Melalui evaluasi tersebut, pelaksanaan kebijakan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, petugas juga diberikan arahan agar dalam melakukan pengendalian tetap mengutamakan pendekatan pelayanan dan komunikasi yang baik. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa perbedaan tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir sehingga pengendalian tidak hanya membutuhkan tindakan tegas, tetapi juga edukasi secara berkelanjutan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi pengawasan juga dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pihak lain yang berada di sekitar lokasi parkir, seperti pengelola kawasan wisata, masyarakat sekitar, dan pihak terkait lainnya. Kerja sama tersebut diperlukan karena pengelolaan parkir tidak dapat dilakukan hanya oleh Dinas Perhubungan, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak agar ketertiban dapat tercipta secara bersama-sama. Melalui koordinasi tersebut, informasi mengenai kondisi parkir dapat diperoleh lebih cepat sehingga tindakan yang diperlukan dapat segera dilakukan. Namun, hambatan yang masih ditemukan adalah belum semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengawasan dan pengendalian parkir, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih intensif agar seluruh pihak dapat menjalankan perannya secara optimal.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian juga dilakukan melalui pendekatan pembinaan kepada masyarakat. Pengawasan tidak hanya dilakukan dengan memberikan teguran ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui pemberian pemahaman mengenai manfaat tertib parkir bagi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Pendekatan persuasif tersebut dinilai lebih efektif karena mampu membangun kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan kesan bahwa kebijakan hanya bersifat membatasi. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang membutuhkan waktu untuk memahami dan menerima aturan parkir, terutama pada kawasan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi. Oleh karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara konsisten dengan tetap mengedepankan komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir dilakukan melalui peningkatan pemantauan di lapangan, penguatan koordinasi antarpetugas dan pihak terkait, pelaksanaan evaluasi secara berkala, serta pemberian pembinaan kepada masyarakat. Pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai

dengan aturan serta membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya ketertiban parkir. Keberadaan petugas di lapangan, komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai pihak menjadi faktor pendukung dalam menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan aman. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah petugas pengawas, luasnya wilayah pelayanan, peningkatan aktivitas kendaraan pada kawasan wisata, serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi aturan parkir. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian perlu terus dilakukan secara konsisten melalui peningkatan kapasitas pelaksana, pemanfaatan sarana pendukung, serta pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat agar implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa strategi penguatan sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran terlihat melalui keterlibatan petugas dalam melakukan pemantauan langsung pada lokasi parkir, pengaturan kendaraan, serta pemberian arahan kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petugas telah berupaya menjaga ketertiban parkir dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan area parkir dan membantu mengatasi permasalahan yang muncul di lapangan. Selain itu, koordinasi antarpetugas terlihat dilakukan untuk menyesuaikan pengawasan dengan kondisi dan tingkat kepadatan kendaraan, terutama pada kawasan yang

memiliki aktivitas tinggi. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan jangkauan pengawasan, meningkatnya jumlah kendaraan pada waktu tertentu, serta masih adanya pengguna kendaraan yang belum sepenuhnya mematuhi aturan parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian telah mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat parkir, tetapi masih memerlukan peningkatan secara berkelanjutan agar mampu menciptakan ketertiban, kepatuhan, dan kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Pangandaran.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian telah menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan langsung di lapangan, evaluasi pelaksanaan, koordinasi antarpetugas dan pihak terkait, serta pendekatan pembinaan kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan terhadap aturan parkir. Meskipun pelaksanaan pengawasan telah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap ketertiban parkir, masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya pengawas, luasnya wilayah pelayanan, serta belum sepenuhnya meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan parkir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas petugas, optimalisasi sarana pendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran

dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Partisipasi dan kesadaran masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir, karena keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan dan keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam pengelolaan tempat parkir, masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena aktivitas parkir secara langsung berkaitan dengan perilaku pengguna kendaraan dalam memanfaatkan ruang publik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan parkir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama.

Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui upaya membangun pemahaman bahwa kebijakan pengelolaan parkir bukan semata-mata sebagai bentuk pembatasan atau kewajiban yang harus dipatuhi, tetapi merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan perlu diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan lokasi parkir yang telah ditentukan, mematuhi rambu dan aturan parkir, serta ikut menjaga ketertiban lingkungan sekitar. Dengan adanya

pemahaman tersebut, masyarakat akan lebih terdorong untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan tempat parkir.

Selain meningkatkan kepatuhan masyarakat, partisipasi juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, menyampaikan keluhan, maupun melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir. Keterlibatan tersebut dapat membantu Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran memperoleh informasi mengenai kondisi nyata di lapangan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan pola kerja sama yang saling mendukung dalam mewujudkan sistem pengelolaan parkir yang lebih efektif.

Namun demikian, peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti masih adanya sebagian masyarakat yang kurang memahami aturan parkir, kebiasaan menggunakan lokasi parkir yang tidak sesuai ketentuan, serta rendahnya kepedulian terhadap dampak parkir yang tidak tertib terhadap pengguna jalan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat membutuhkan proses yang dilakukan secara terus-menerus melalui pendekatan komunikasi, edukasi, dan keteladanan dari pemerintah maupun petugas pelaksana.

Dengan demikian, partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi strategi yang sangat diperlukan dalam memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, dukungan terhadap aturan yang berlaku, serta kerja

sama yang baik antara pemerintah dan pengguna layanan, pengelolaan tempat parkir dapat berjalan lebih optimal. Pada akhirnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem parkir yang tertib, nyaman, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan parkir serta mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi utama dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dilakukan melalui pendekatan komunikasi yang lebih humanis dan edukatif. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa aturan parkir bukan semata-mata bentuk pembatasan, tetapi merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi langsung, arahan petugas di lapangan, serta kerja sama dengan pihak-pihak yang berada di sekitar kawasan parkir. Pendekatan tersebut dilakukan karena perubahan perilaku masyarakat membutuhkan proses yang tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran bersama. Namun demikian, masih terdapat tantangan karena karakteristik masyarakat dan wisatawan yang datang ke Pangandaran cukup beragam, sehingga diperlukan upaya komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus agar kepatuhan terhadap aturan parkir dapat semakin meningkat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan mengoptimalkan peran petugas sebagai pemberi pelayanan sekaligus penyampai informasi di lapangan. Petugas tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga memberikan penjelasan kepada masyarakat

mengenai lokasi parkir yang sesuai, tata tertib penggunaan fasilitas parkir, serta dampak positif dari mematuhi aturan. Cara penyampaian yang ramah dan tidak langsung memberikan tindakan tegas dinilai lebih mudah diterima oleh masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa petugas hadir untuk membantu menciptakan kondisi parkir yang lebih tertib. Namun, masih terdapat kendala berupa sebagian masyarakat yang belum terbiasa mengikuti aturan parkir, terutama ketika mereka merasa lokasi parkir yang ditentukan kurang dekat dengan tujuan mereka.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya tertib parkir melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi secara sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami alasan di balik penerapan kebijakan tersebut. Petugas berusaha membangun hubungan yang baik dengan pengguna kendaraan sehingga masyarakat merasa dihargai dan lebih terbuka menerima arahan. Selain itu, masukan dari masyarakat juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan pengelolaan parkir. Namun demikian, hambatan yang masih dihadapi adalah masih adanya masyarakat yang menganggap aturan parkir hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban bersama.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Peningkatan partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pengelola kawasan wisata, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar lokasi parkir. Kerja sama tersebut dilakukan agar informasi mengenai aturan parkir dapat disampaikan secara lebih luas dan tidak hanya bergantung pada petugas Dinas Perhubungan. Pihak-pihak yang berada dekat dengan lokasi parkir memiliki peran penting dalam membantu mengingatkan pengguna kendaraan agar mengikuti ketentuan yang berlaku. Strategi ini dinilai efektif karena masyarakat lebih mudah menerima informasi apabila disampaikan melalui lingkungan yang dekat dengan aktivitas mereka. Namun demikian, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir.

Begitupula hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa :

Strategi lain yang dilakukan adalah memberikan contoh pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui sikap petugas yang disiplin, ramah, dan bertanggung jawab. Sikap positif dari pelaksana menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Ketika masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, mereka akan lebih mudah memahami dan mendukung aturan parkir yang berlaku. Selain itu, petugas juga melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat yang belum mematuhi aturan agar mereka memahami pentingnya ketertiban parkir. Namun, perubahan kesadaran masyarakat membutuhkan waktu karena berkaitan dengan kebiasaan dan perilaku pengguna kendaraan yang telah terbentuk sebelumnya. Oleh karena itu, strategi peningkatan kesadaran harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan parkir dilakukan melalui pendekatan komunikasi yang humanis, sosialisasi secara berkelanjutan, pemberian edukasi langsung di lapangan, serta kerja sama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan aktivitas parkir. Upaya tersebut diarahkan agar masyarakat tidak hanya memahami aturan yang berlaku, tetapi juga menyadari bahwa ketertiban parkir merupakan tanggung jawab bersama dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Peran petugas sebagai pelaksana kebijakan juga menjadi faktor penting melalui pemberian pelayanan yang ramah, arahan yang mudah dipahami, serta pendekatan persuasif ketika menghadapi masyarakat yang belum mematuhi ketentuan parkir. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti belum meratanya kesadaran masyarakat, perbedaan karakteristik pengguna kendaraan, serta masih

adanya sebagian masyarakat yang mengutamakan kemudahan lokasi parkir dibandingkan kepatuhan terhadap aturan.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa strategi peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran terlihat melalui interaksi langsung antara petugas dengan pengguna kendaraan di lokasi parkir. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petugas telah berupaya memberikan arahan, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan area parkir yang telah ditentukan, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama. Selain itu, terlihat adanya masyarakat yang mulai menunjukkan kepatuhan dengan mengikuti arahan petugas dan memanfaatkan fasilitas parkir sesuai ketentuan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pengguna kendaraan yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi aturan parkir, terutama pada saat terjadi peningkatan aktivitas kendaraan di kawasan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan melalui sosialisasi yang lebih intensif, pendekatan yang persuasif, serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan agar kebijakan pengelolaan tempat parkir dapat diterapkan secara lebih efektif.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat merupakan langkah penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir. Upaya melalui

sosialisasi, edukasi, pendekatan persuasif, serta kerja sama dengan berbagai pihak telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir. Meskipun demikian, tingkat kesadaran masyarakat belum sepenuhnya merata karena masih terdapat sebagian pengguna kendaraan yang belum konsisten dalam mengikuti ketentuan yang berlaku, terutama pada kondisi tertentu dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan melalui komunikasi yang lebih intensif, peningkatan pelayanan petugas, serta pelibatan masyarakat agar tumbuh kesadaran bersama bahwa ketertiban parkir merupakan bagian dari tanggung jawab seluruh pihak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran meliputi peningkatan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya pelaksana, optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Strategi tersebut diperlukan karena keberhasilan pengelolaan parkir tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan pelaksana dalam memahami dan menjalankan kebijakan serta dukungan masyarakat sebagai pengguna layanan. Peningkatan komunikasi dilakukan agar informasi mengenai aturan, tujuan, dan mekanisme parkir dapat dipahami secara jelas oleh seluruh pihak. Selain itu, penguatan sumber daya pelaksana melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan sarana prasarana, dan dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam

menunjang efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sistem pengawasan dan pengendalian juga perlu diperkuat melalui pemantauan secara berkala, evaluasi, serta koordinasi antar pihak agar pelaksanaan parkir tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pendekatan persuasif menjadi faktor pendukung dalam membangun kepatuhan terhadap aturan parkir.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan, namun masih belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh adanya regulasi, pembagian tugas pelaksana, upaya komunikasi kebijakan, penyediaan sumber daya, serta kegiatan pengawasan dan pengendalian di lapangan. Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan perannya melalui pengaturan lokasi parkir, pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ketertiban parkir. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap aturan parkir, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, kondisi wilayah Kabupaten Pangandaran yang memiliki tingkat aktivitas kendaraan tinggi terutama pada kawasan wisata, serta perlunya peningkatan

konsistensi pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan secara berkelanjutan melalui peningkatan komunikasi, optimalisasi sumber daya pelaksana, pengawasan yang lebih efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Winarno (2014:177) yang menyatakan bahwa : "Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi".

Dalam konteks pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran, aspek komunikasi terlihat dari upaya Dinas Perhubungan dalam menyampaikan aturan dan tujuan kebijakan kepada petugas maupun masyarakat, meskipun masih terdapat kendala berupa belum meratanya pemahaman masyarakat. Aspek sumber daya berkaitan dengan ketersediaan aparatur, anggaran, serta sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum optimal. Selanjutnya, aspek disposisi atau sikap pelaksana terlihat dari adanya komitmen petugas dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan parkir, sedangkan aspek struktur birokrasi

tercermin melalui adanya pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan prosedur kerja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2017:136) yang menjelaskan bahwa :

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan ruang parkir. Namun, lingkungan sosial masyarakat sebagai pengguna layanan masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena tingkat kepatuhan terhadap aturan parkir belum sepenuhnya merata. Kondisi Kabupaten Pangandaran sebagai daerah wisata juga menjadi faktor lingkungan yang memengaruhi implementasi kebijakan karena peningkatan jumlah kendaraan pada waktu tertentu membutuhkan kesiapan sumber daya dan sistem pengawasan yang lebih kuat.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan konsep manajemen pemerintahan yang dikemukakan oleh Ndraha (2011:159) bahwa : “Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif”.

Dalam pengelolaan tempat parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah menjalankan fungsi manajemen pemerintahan melalui penyusunan aturan, pembagian tugas kepada pelaksana, pelaksanaan pelayanan

parkir, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Namun, optimalisasi fungsi tersebut masih membutuhkan peningkatan terutama dalam aspek pengawasan, pemanfaatan sumber daya, dan pelibatan masyarakat agar pelayanan publik yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan, namun masih memerlukan berbagai penguatan agar dapat mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kesiapan sumber daya, komitmen pelaksana, struktur birokrasi, serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan parkir perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas organisasi, peningkatan pengawasan, dan pembangunan kesadaran masyarakat sehingga kebijakan pengelolaan tempat parkir mampu memberikan pelayanan publik yang tertib, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

4.2.2 Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan meliputi adanya komitmen Dinas Perhubungan dalam menjalankan

tugas, dukungan sumber daya pelaksana yang memiliki tanggung jawab dan pengalaman, adanya koordinasi antarpetugas, keberadaan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan, serta mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir. Sementara itu, faktor penghambat yang masih ditemukan antara lain penyampaian informasi kebijakan yang belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat, keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan luas wilayah pengelolaan parkir, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan anggaran operasional, serta kondisi Kabupaten Pangandaran sebagai daerah wisata yang memiliki tingkat aktivitas kendaraan cukup tinggi pada waktu tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir telah berjalan dengan adanya dukungan dari berbagai aspek, namun masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan agar hambatan yang ada dapat diminimalkan dan tujuan kebijakan dalam menciptakan pengelolaan parkir yang tertib, aman, dan efektif dapat tercapai.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Agustino (2017:136) yang menyatakan bahwa :”Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi”.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran terlihat dari adanya komunikasi dan koordinasi antarpetugas, komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas, serta keberadaan regulasi yang menjadi pedoman kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek disposisi pelaksana dan struktur birokrasi

telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Namun, masih adanya hambatan berupa belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan sumber daya masih membutuhkan peningkatan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2015:99) yang menjelaskan bahwa :

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta kecenderungan atau sikap pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung seperti adanya regulasi, koordinasi antartugas, serta komitmen pelaksana menunjukkan bahwa standar kebijakan dan karakteristik organisasi pelaksana telah mendukung proses implementasi. Namun, kondisi lingkungan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah wisata dengan mobilitas kendaraan yang tinggi menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Peningkatan jumlah kendaraan pada waktu tertentu membutuhkan kesiapan sumber daya yang lebih besar agar pengelolaan parkir tetap berjalan secara tertib dan mampu mengatasi dinamika di lapangan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh teori manajemen pemerintahan yang dikemukakan oleh Syafiie (2013:101) bahwa :
 ”Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan pengelolaan sumber daya, koordinasi, pembagian tugas, dan pengawasan agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif”. Dalam konteks pengelolaan tempat parkir, Dinas

Perhubungan Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan fungsi manajemen pemerintahan melalui pengaturan tugas pelaksana, koordinasi antarbagian, serta kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Namun, keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung menunjukkan bahwa pengelolaan tersebut masih perlu diperkuat agar pelayanan parkir dapat berjalan secara optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh keterkaitan antara aspek internal organisasi dan kondisi lingkungan masyarakat. Adanya regulasi, komitmen pelaksana, koordinasi, serta dukungan masyarakat menjadi kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, anggaran, dan belum optimalnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan secara berkelanjutan melalui peningkatan komunikasi kebijakan, optimalisasi sumber daya, penguatan pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

4.2.3 Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, yaitu melalui peningkatan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya pelaksana, optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Peningkatan komunikasi dilakukan agar informasi mengenai aturan, tujuan, dan mekanisme pengelolaan parkir dapat dipahami secara jelas oleh pelaksana maupun masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang lebih mudah diterima. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya pelaksana perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, serta optimalisasi dukungan anggaran agar petugas mampu menjalankan tugas secara profesional. Sistem pengawasan dan pengendalian juga perlu diperkuat melalui pemantauan lapangan secara rutin, evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta peningkatan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan parkir. Di sisi lain, peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting melalui edukasi, pendekatan persuasif, dan pelibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban parkir. Dengan penerapan strategi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat

berjalan lebih efektif, tertib, aman, serta mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Winarno (2014:177) yang menjelaskan bahwa : “Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi”.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, strategi peningkatan komunikasi dan sosialisasi kebijakan merupakan bentuk penguatan aspek komunikasi agar informasi mengenai kebijakan dapat diterima secara jelas oleh seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya, strategi peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana berkaitan dengan aspek sumber daya yang mencakup ketersediaan aparatur, fasilitas, serta dukungan anggaran yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, strategi penguatan pengawasan dan pengendalian mencerminkan pentingnya aspek disposisi pelaksana, yaitu komitmen dan tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun peningkatan partisipasi masyarakat menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Selanjutnya Winarno (2014:149) yang menyatakan bahwa : ”Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*)”.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran tidak hanya berfokus pada aspek internal

organisasi, tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan parkir sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini penting karena pengelolaan tempat parkir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat agar aturan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif.

Selain itu, strategi tersebut juga sesuai dengan konsep pelayanan publik yang dikemukakan oleh Sinambela (2014:5) bahwa :”Pelayanan publik yang baik harus mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan”.

Dalam konteks pengelolaan tempat parkir, peningkatan kualitas komunikasi, penguatan kemampuan petugas, serta peningkatan pengawasan merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Petugas parkir tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai pemberi pelayanan yang harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana, optimalisasi

pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Strategi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, membangun komunikasi yang efektif, dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mendukung kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, apabila strategi tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, maka pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran akan semakin efektif dalam menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.